

LAPORAN BULAN JANUARI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bulan Januari Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan bulan Januari 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode bulan Januari Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Laporan ini dibuat dan disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang disertai pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belum sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Bulan Januari Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2025

Deputy Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	6
RENCANA KINERJA OUTPUT/RO	6
BAB III.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
A. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	9
B. Monitoring Kegiatan Prioritas	11
BAB IV	68
PENUTUP	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tanggadan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia,

daging unggas dan cabai.

Oleh karena itu, sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode bulan Januari 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

1.2 TUJUAN

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan Januari 2025.
- b. Melakukan Pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Januari 2025

1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN

- a. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
- b. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
- c. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II

RENCANA KINERJA OUTPUT/RO

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Pada tahun 2025, mengacu pada DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga dengan mengampu sebanyak 6 (enam) klasifikasi rincian output (KRO) dan 6 (enam) Rincian Output (RO).

Sebagai tindak lanjut pencaianan program/kegiatan tersebut, maka disusun rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Januari tahun 2025 akan dilihat dari pencapaian output/RO, komponen dan sub komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA pada bulan Januari Tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Januari ditargetkan sebesar 5%. Target tersebut sebagaimana tersaji

pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari Sesuai DIPA Deputi Bidang
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Januari 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 5% (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.402.855.000	2 rekomendasi kebijakan	70.142.750	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	2.206.825.000	12 rekomendasi kebijakan	110.341.250	0
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	2.465.033.000	6 rekomendasi kebijakan	123.251.650	0
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1.706.796.000	6 kegiatan	85.339.800	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	1.392.954.000	1 Kegiatan	69.647.700	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	5.880.050.000	1 kegiatan	294.002.500	1

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	360.476.000	6 NSPK	18.023.800	0
	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	675.175.000	10 NSPK	33.758.750	0
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.079.137.000	14 NSPK	53.956.850	0
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	1.000.000.000	50 Kelompok Masyarakat	0	0
		Gerakan Pangan Murah yang diaksanakan	2.710.000.000	1 Kelompok Masyarakat	0	0
		Kios Pangan yang dikembangkan	375.299.000	1 Kelompok Masyarakat	0	0
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4.509.576.000	4 Data	225.478.800	0
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	11.361.705.000	12 Data	568.085.250	0
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	472.625.000	1 Data	23.631.250	0
RAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.	Sarana Logistik Pangan	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	4 Unit	0	0
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	3 Unit	0	0

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan KRO dan Output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan, KRO, RO, Komponen dan sub komponen dari masing-masing Direktorat lingkup kedeputiansebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Sesuai DIPA Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Target Bulan Januari 2025		Realisasi Bulan Januari 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan 5% (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	70.142.750	0	0	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	110.341.250	0	53.166.744	0
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	123.251.650	0	0	0
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev	85.339.800	1	25.086.504	0

AEA- Koordinasi	Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	dan Pelaporan Ketersediaan Pangan				
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	69.647.700	1	56.361.165	0
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	294.002.500	1	166.642.443	1
AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	18.023.800	0	0	0
	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	33.758.750	0	6.500.000	0
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	53.956.850	0	0	0
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	0	0	0	0
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	0	0	0	0
		Kios Pangan yang dikembangkan	0	0	0	0
QMA - Data dan Informasi	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	225.478.800	0	23.770.663	0
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	568.085.250	0	0	0

Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	23.631.250	0	0	0
RAG – Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.	Sarana Logistik Pangan	Sarana Logistik Pangan	0	0	0	0
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0	0	0	0

Berdasarkan Laporan hasil realisasi fisik dan keuangan pada Ouput/RO dan komponen lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan Januari tahun 2025 sebagaimana tabel di atas Realisasi anggaran per bulan Januari 2025 berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan masih Rp.331.527.519,- atau 0,70% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp47.598.506.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana penarikan bulan Januari 2025, yaitu sebesar Rp1.675.660.350,-. Hal ini disebabkan karena belum meratanya realisasi keuangan di masing-masing RO di setiap Direktorat. Berdasarkan realisasi keuangan tersebut, maka belum ada realisasi fisik pada bulan Januari dari masing-masing RO. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk perencanaan keuangan di masing-masing RO di bulan selanjutnya.

B. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil Monitoring Kegiatan prioritas lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan Januari 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, walaupun belum ada realisasi anggaran namun kegiatan fisik yang mendukung pencapaian kegiatan tetap diselenggarakan sebagai berikut:

a) Direktorat Ketersediaan Pangan

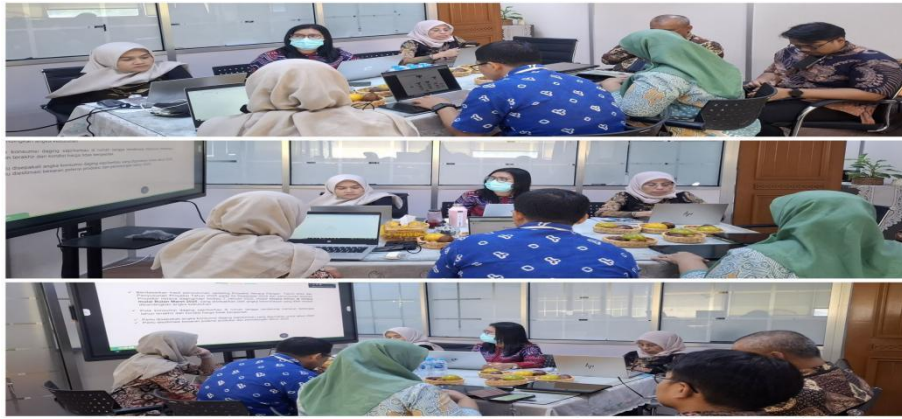
1. Penyusunan Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau Tahun 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Pertemuan ini bertujuan untuk

memfinalisasi penyusunan dan menyepakati data Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau Tahun 2025. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Neraca Pangan, dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesmavet PKH Kementan, dan Pejabat Fungsional dan Pelaksana Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan. Poin-Poin Hasil Pertemuan, sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penyusunan updating proyeksi neraca pangan tahun 2024 dan penyusunan proyeksi tahun 2025 pada 23 desember 2024 dan penyusunan lanjutan proyeksi neraca daging sapi/kerbau 7 januari 2025, terjadi neraca minus di bulan maret 2025 yang disebabkan oleh angka ketersediaan yang lebih rendah dibandingkan angka kebutuhan
- b) Perkiraan produksi daging sapi/kerbau lokal tahun 2025 sebesar 2.094.548 ekor atau 410.322 Ton merupakan produksi daging sapi/kerbau Ditjen PKH Kementan
- c) Pola konsumsi daging sapi/kerbau di rumah tangga cenderung menurun beberapa tahun terakhir dan kondisi harga tidak bergejolak
- d) Kebutuhan daging sapi/kerbau 2025 disepakati sebesar 766.968 Ton yang merupakan perkalian angka konsumsi yaitu sebesar 2,696 kg/kapita/tahun dikalikan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 284.438.782 jiwa (SP2020 BPS)
- e) Perkiraan pemotongan sapi/kerbau bakalan impor 2025 sebesar 520.685 ekor atau 141.329 Ton yang terdiri dari stok kandang awal tahun 2025 sebesar 179.674 ekor atau 48.770 Ton dan rencana pemotongan tahun 2025 sebesar 341.011 ekor atau 92.561 Ton dari rencana impor sapi/kerbau bakalan sebesar 350.000 ekor.
- f) Perkiraan impor daging sapi/kerbau 2025 sebesar 186.715,67 ton terdiri dari daging sapi/kerbau konsumsi regular sebesar 180.000 ton dan daging industri sebesar 6.715,67 ton (berdasar Rakor Menteri 9 Desember 2024).
- g) Tindak Lanjut: Bapanas akan memfinalisasi data proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025 untuk semua komoditas pangan.

Dokumentasi:



2. Rapat menyusun Draft RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Rapat bertujuan untuk menyusun RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang tertera pada Pasal 73. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan. Poin-Poin Hasil Pertemuan sebagai berikut:

- a) RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan merupakan amanat dari PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang tertera pada Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.
- b) Telah disusun matriks terkait draft RPerbadan Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan yang meliputi ruang lingkup kebijakan, subjek pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi administrasi.
- c) Ruang lingkup kebijakan pengawasan ketersediaan pangan sesuai dengan yang tertera pada PP No. 17 Tahun 2015 Pasal 72 meliputi: perhitungan neraca pangan secara berkala, pengelolaan cadangan pangan nasional, pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor, dan pengaturan stok serta distribusi pangan.
- d) Objek dari ruang lingkup kebijakan terdiri dari Dinas urusan Pangan seluruh wilayah RI, BUMN Pangan, Importir, produsen, serta distributor.
- e) Subjek dari RPerbadan terdiri dari Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kepala Badan mendelegasikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Dinas urusan Pangan tingkat Provinsi, dan Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas urusan Dinas

Pangan tingkat kabupaten/kota.

- f) Ruang lingkup Rperbadan: 1) neraca pangan wilayah tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) Pengelolaan cadangan pangan nasional; 3) Pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor; 4) tersedianya laporan realisasi dan distribusi oleh importir secara berkala; 5) pengaturan stok dan distribusi pangan; 6) mekanisme pelaksanaan pengawasan; 7) pembinaan meliputi sosialisasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise; 8) Pemantauan dan Evaluasi; 9) Sanksi
- g) Rencana Tindak Lanjut: Akan dilaksanakan rapat lanjutan dalam rangka penyusunan draft RPerbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok.

Dokumentasi:



3. Pertemuan Perhitungan Kebutuhan Pangan

Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat ini terkait sumber data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan non-rumah tangga yang selama ini digunakan pada proyeksi neraca pangan yaitu Bapok 2017 dirasa membutuhkan pemutakhiran survey untuk dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan BAPANAS, serta dihadiri oleh perwakilan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan perwakilan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, BPS. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Survey Bapok terakhir yang dilakukan oleh BPS adalah Bapok 2019, namun untuk perhitungan proyeksi neraca pangan, BPS menyarankan untuk menggunakan Bapok 2017 dikarenakan survey Bapok yang resmi dilakukan pada tahun 2017.
- b) Dalam penyusunan proyeksi neraca pangan, data Bapok 2017 digunakan untuk menghitung angka konsumsi/kebutuhan non-rumah tangga. Namun dirasa data Bapok 2017 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini (Tahun 2024).

- c) BPS menyampaikan asal usul survey kebutuhan non-rumah tangga dilakukan berdasarkan arahan dari pimpinan yang mempertanyakan kebutuhan di level non-rumah tangga dengan menggunakan anggaran dari BKP pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2014 dan 2017 menggunakan anggaran dari BPS dan survey khusus Bapok untuk tahun 2019 dan 2021 tidak ada karena anggaran tidak mencukupi.
- d) Survey Bahan Pokok saat ini sudah menjadi tugas di Bapanas, sehingga BPS menyerahkan kepada Bapanas untuk dapat melakukan survey dan BPS akan mengawal metode survey yang digunakan
- e) Institusi-institusi yang masuk pada survey Bapok diantaranya UMKM dan hotel, asrama, lapas, panti asuhan, dan data rumah tangga dari Susenas.
- f) Rencana Tindak Lanjut: Bapanas perlu melakukan survei kebutuhan yang terbaru karena saat ini kewenangan untuk menghitung kebutuhan pangan.
- g) Dokumentasi:



4. Laporan Evaluasi Proyeksi Neraca Pangan tahun 2024 dan Sosialisasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 secara daring via zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaporan proyeksi neraca pangan tahun 2024 dan menyosialisasi perubahan pada juknis proyeksi neraca pangan tahun 2025. Pertemuan ini dibuka oleh perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan BAPANAS dan dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pangan seluruh Provinsi. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Total gabungan realisasi anggaran dekonsentrasi kegiatan ketersediaan pangan di Provinsi dan Kab/Kota per tanggal 31 Desember sebesar 96%.
- b) Total realisasi anggaran dekonsentrasi di 38 Provinsi per tanggal 31 Desember 2014

sebesar 96%. 3 Provinsi yang realisasinya kecil dari 80% yaitu Provinsi Kalimantan Tengah (70%), Papua Pegunungan (60%) dan Papua Barat Daya (60%).

- c) Berdasarkan rekap Bimtek Neraca Pangan Wilayah 2024, terdapat 30 Provinsi yang sudah melaksanakan Bimtek dan 8 Provinsi yang tidak melaksanakan Bimtek yaitu Provinsi NTB, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Aceh, Papua Selatan, Papua Selatan, Papua Tenggara Papua Barat Daya. Progres penginputan laporan proyeksi neraca pangan tahun 2024 di web proyeksi neraca pangan oleh 38 Provinsi yaitu 55% untuk update bulan Desember dan 47% untuk Kab/Kota. Diharapkan untuk provinsi dan kab/kota yang belum menginput dapat segera menginput.
- d) Terdapat poin-poin yang direvisi/ditambahkan pada Juknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 diantaranya:
 - Gubernur dan Bupati/Wali kota membentuk tim yang ditetapkan/disahkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota/ Sekretaris Daerah.
 - Menetapkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan proyeksi neraca pangan
 - Melakukan rapat koordinasi setiap bulan dengan tim penyusun dari OPD terkait untuk update data dan menyepakati data yang akan digunakan dalam setiap bulan.
- e) Penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah dan pembentukan tim proyeksi neraca pangan wilayah sebaiknya ditujukan kepada Kepala Daerah, harapannya agar masing-masing kepala daerah dapat mengetahui akan kewajibannya untuk menyusun proyeksi neraca pangan di tingkat daerah serta mempermudah Dinas Pangan memperoleh data dari OPD penyedia data.
- f) Rencana Tindak Lanjut: Direktorat Ketersediaan Pangan akan mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Daerah dan Juknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.

Dokumentasi:



5. Rapat Koordinasi Tim Neraca

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di Bogor. Pertemuan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait penyusunan laporan updating proyeksi neraca bulan Januari 2025, review draft laporan tahunan NBM Tahun 2024, dan pembahasan matrik pengembangan aplikasi proyeksi neraca pangan pada tahun 2025. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Tim Neraca Pangan dan dihadiri oleh tim neraca pangan. Point hasil pertemuan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Laporan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2024 (updating data realisasi bulan Desember) dan penyusunan Laporan Proyeksi Neraca pangan update Bulan Januari Tahun 2025.
- b) Finalisasi draft surat permohonan pembentukan tim proyeksi neraca pangan provinsi dan kab/kota ke kepala daerah dan kepala dinas.
- c) Penyusunan matrik rencana pengembangan aplikasi proyeksi neraca pangan Tahun 2025.
- d) Verifikasi data neraca bahan makanan tahun 2024.
- e) Rencana Tindak Lanjut: Surat permohonan pembentukan tim proyeksi neraca pangan provinsi dan kab/kota akan dikirimkan kepada kepala daerah dan kepala dinas.

Dokumentasi;



6. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan DI Yogyakarta

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Alamanda Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY pada hari Jumat, 24 Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi serta evaluasi terkait penyusunan proyeksi neraca pangan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan diskusi dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait perhitungan ketersediaan pangan dari perdagangan antarwilayah yang sulit untuk dilakukan.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan (DPKP) Provinsi DI Yogyakarta, yang selanjutnya dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas. Serta dihadiri oleh Akademisi dari Departemen Ekonomi dan Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Kondisi kebutuhan dan ketersediaan di Provinsi DIY memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: kebutuhan pangan di DIY lebih besar dibandingkan produksi, sehingga membutuhkan pendataan barang masuk. Pada periode HBKN, kebutuhan meningkat karena adanya lonjakan jumlah wisatawan hingga 1,5x dari total penduduk DIY. Barang masuk ke pasar di DIY tidak tersentral, sehingga setiap pasar atau pedagang memiliki pemasok yang berbeda.
- b) Provinsi DIY pernah melakukan kajian terkait Tataniaga Ketersediaan dan Kebutuhan Provinsi DIY di tahun 2017, yang bekerja sama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM).
- c) Provinsi DIY berencana mengadakan kajian terkait cadangan pangan di rumah tangga. Hal ini berdasarkan karakteristik masyarakat DIY yang tidak menjual hasil panen, namun cenderung menyimpan hasil panen sebagai stok rumah tangga. Terutama wilayah Gunung Kidul yang mengandalkan padi gogo dan hanya 1x panen dalam 1 tahun, sehingga seluruh hasil panen disimpan untuk kebutuhan rumah tangga.
- d) Poin-poin hasil diskusi dengan Universitas Gadjah Mada, antara lain:
 - Berdasarkan pengalaman riset di Maluku Utara, riset yang dilakukan terkait perdagangan antarwilayah hanya melihat berdasarkan sampling pada 3 pedagang besar dan tidak tersedia data populasi.
 - Jembatan timbang kurang menggambarkan kondisi barang keluar-masuk. Solusi selain menggunakan jembatan timbang adalah dengan bekerja sama mengembangkan AI image processing pada CCTV lalu lintas Polri di setiap jalan perbatasan, namun kekurangan cara tersebut adalah tidak bisa merekam truk tertutup.
 - Fluktuasi harga tidak hanya disebabkan oleh supply-demand, tetapi juga terjadi karena asymmetrical information sehingga tidak adanya transparansi keadaan stok antar wilayah. Bank Indonesia melakukan digitalisasi pertanian dengan mengembangkan aplikasi dipanen.id untuk transparansi pemanenan, perdagangan/ pemasaran cabai yang telah diinisiasi di Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo.
 - Pemodelan perdagangan antar wilayah perlu disesuaikan dengan

karakteristik wilayah masing-masing, serta mengkalibrasi kebutuhan berdasarkan seasonal influx saat HBKN atau masa liburan karena peningkatan jumlah wisatawan.

- Tindak Lanjut: Diskusi lebih lanjut dengan UGM terkait pemodelan perdagangan antar wilayah dengan Provinsi DIY sebagai pilot project.



7. Rapat Pembahasan Data Konsumsi Komoditas Peternakan

Rapat dilaksanakan di R.R Sekretariat II Ditjen PKH Kementan pada hari Jumat, 17 Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk tindak lanjut penyusunan target Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2025-2029, utamanya terkait Sasaran Program SP 2 yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Asal Peternakan. Pertemuan dipimpin oleh Sekdijen PKH Kementan, dan dihadiri oleh lingkup Ditjen PKH, Pusdatin Kementan, Direktorat Kesra BPS, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS, Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS, Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, dan Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Bapanas. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Terkait sasaran program SP 2 yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga asal peternakan dari produksi dalam negeri, maka dibutuhkan data produksi (daging, telur, susu) 5 tahun sebelumnya, proyeksi produksi 2025-2029, jumlah penduduk, konsumsi komoditas per kapita 5 tahun sebelumnya dan proyeksi konsumsi komoditas per kapita 2025-2029.
- b) Data konsumsi komoditas daging kambing dan domba dari tahun 2020-2024 bersumber dari Susenas BPS, namun untuk data tersebut nilai nya sangat kecil karena hanya berasal dari daging mentah yang diolah di rumah tangga dan tidak termasuk dalam bentuk sate atau tongseng.
- c) Data konsumsi sate atau tongseng sulit diidentifikasi karena jika rumah tangga mengkonsumsi daging kambing/domba dalam bentuk makanan jadi tidak dipisahkan

antara daging ayam/kambing/sapi karena pada kuesioner hanya tertulis sate/tongseng.

- d) Bapanas menyampaikan angka konsumsi untuk komoditas daging sapi, daging ayam, dan telur dalam proyeksi neraca pangan menggunakan angka kesepakatan oleh tim proyeksi neraca pangan nasional. Dalam perhitungan kebutuhan terdiri dari 2 komponen yaitu konsumsi RT yang bersumber dari angka susenas dan konsumsi non RT yang berasal dari angka Bapok 2017, namun karena data bapok tidak ada update sejak 2017 sehingga kami melakukan penyesuaian dari angka bapok tersebut berdasarkan pertimbangan lain dengan kesepakatan bersama BPS.
- e) Ditjen PKH Kementan dan BPS mengatakan mendukung dan mendorong Bapanas untuk segera melakukan update survey bapok yang terakhir dilakukan pada tahun 2017. Namun dengan kondisi anggaran di Bapanas saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tahun 2025.
- f) Angka konsumsi yang dimasukkan dalam Renstra PKH Kementan sudah memperhitungkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,85% di tahun pertama RPJMN 2025-2029 sebagai dampak adanya program MBG. Program makan bergizi gratis akan mendorong permintaan baru, termasuk komoditas peternakan strategis (daging dan susu) yang merupakan menu utama MBG yang disediakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari BGN.
- g) Rencana Tindak Lanjut: Ditjen PKH Kementan aja memfinalisasi data penyusunan untuk renstra 2025-2029.

8. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Optimalisasi Ketersediaan Gudang

Pertemuan dilaksanakan secara online pada Senin, 20 Januari 2025. Rapat merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi teknis terkait optimalisasi ketersediaan gudang yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 dan dalam upaya persiapan panen raya yang akan diperkirakan akan dimulai pada akhir bulan Februari 2025. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan, dihadiri oleh perwakilan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Bappebti, perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, perwakilan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, perwakilan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, perwakilan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Perum Bulog NTB, Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, perwakilan Supply Chain dan Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, serta PT BGR Logistik Indonesia.

Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar menyampaikan bahwa total kompleks pergudangan yaitu 49 dengan total kapasitas 206 unit. Kondisi gudang yang rusak saat ini proses perbaikan dalam persetujuan, terdapat 9 komplek pengadaan yang akan dilaksanakan tahun ini dan akan digunakan untuk kesiapan di tahun 2026.
- b) Bulog Kanwil NTB menyampaikan bahwa terdapat kondisi gudang yang kurang baik dan dalam proses perbaikan. Space gudang sebesar 117.500 ton untuk gudang induk, dan sedang menjajaki bantuan pinjam pakai sebesar 167.460 ton. Stok taksasi sampai 31 Januari 2025 yaitu stok GKG 3.041,62 ton, stok beras 36.530,13 ton, dan stok jagung sampai 51.634 ton. Total stok saat ini di gudang secara global sebesar 81.205,8 ton (diluar stok jagung di gudang milik mitra).
- c) Kondisi dryer yang tersedia di NTB yaitu 49 unit dan sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk tambahan dryer, terutama vertical dryer. Sesuai dengan data KSA dan Dinas Pangan Provinsi NTB panen sebesar 857.800 ton GKG, dengan jumlah mitra 49 mitra, hanya sanggup 2.845 ton sehari.
- d) Bappebti, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa terdapat 100 gudang SRG di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan dengan kapasitas 147.900 ton, terdiri dari 6 gudang silo, 1 gudang CAS (bawang merah), dan 93 gudang flat. Terdapat beberapa gudang yang dilengkapi dryer 85 gudang, namun dryer yang dibangun oleh Bappebti kapasitas tidak maksimal karena hanya mampu beroperasi 8 ton/hari, dan sebagian besar dalam kondisi rusak. Pemanfaatannya dengan pemerintah daerah, dengan harapan dapat menyerap hasil produksi dari petani di wilayah masing-masing.
- e) Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Kemendag menyampaikan bahwa, Pusat Distribusi Regional (PDR) hanya 2 yang termanfaatkan yaitu di Sulsel dan Sulut, hasil pantauan beberapa sudah rusak. Kendala dari PDR yaitu SDM dan pengelolaan di daerah yang belum mumpuni.
- f) PT BGR Logistik Indonesia saat ini mengelola 517 unit gudang komoditi yang tersebar di seluruh Indonesia, inventarisasi secara internal ada kurang lebih 100 unit gudang dengan kapasitas 443.002 ton.
- g) PT BGR Logistik Indonesia dapat berperan sebagai aggregator dalam mengelola pergudangan dengan menjalin kemitraan.

9. Rapat Koordinasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 Kota Bogor

Pertemuan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor pada hari Senin, 20 Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi awal dengan OPD dan pelaku usaha terkait dalam rangka penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2025 dan evaluasi kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2024. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, yang selanjutnya dimoderatori oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor dan dihadiri oleh narasumber yaitu Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas. Serta dihadiri oleh perwakilan DUKM-Dagin Kota Bogor, Bapperida Kota Bogor, Bidang Pertanian DKPP Kota Bogor, BPS Kota Bogor, Bulog, RNI, IDFood, Perumda Pakuan Jaya, PT Propindo Pasar Anyar, dan pelaku usaha/distributor pangan di Kota Bogor. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Penyediaan pangan di Kota Bogor dipenuhi dari perdagangan antar wilayah. Namun, dalam penyusunan proyeksi neraca pangan menemui kendala yaitu sulit mendapatkan data barang masuk dan keluar dari OPD/stakeholder terkait. Sehingga dilakukan pertemuan dalam rangka koordinasi awal dengan OPD dan pelaku usaha/distributor untuk mendukung pelaksanaan penyusunan proyeksi neraca pangan di tahun 2025.
- b) Untuk mengatasi kesulitan data keluar-masuk pangan, maka perlu dilakukan identifikasi pelaku usaha/stakeholder yang berperan sehingga Outcome dari dilaksanakan pertemuan ini adalah dibentuknya tim penyusun proyeksi neraca pangan Kota Bogor.
- c) Tindak Lanjut: Dinas Pangan Kota Bogor, telah menyusun tim penyusun neraca pangan melibatkan masing-masing OPD dan stakeholder/pelaku usaha/distributor pangan untuk selanjutnya tim penyusun proyeksi neraca pangan yang akan ditanda tangan oleh Walikota Bogor.

10. Laporan Rapat Pelaporan Distribusi atas Impor Barang Tertentu di SSM Perizinan

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Surat dari Direktur Bapokting kepada Direktur Impor terkait permintaan data importir Daging Sapi pada sistem INSW yang telah melaporkan realisasi distribusi. Pertemuan ini dibuka oleh Perwakilan Direktorat Impor Kemendag dan dihadiri oleh perwakilan Dit Bapokting Kemendag, perwakilan PDSI Kemendag, perwakilan LNSW, dan perwakilan Bapanas. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Berdasarkan Perpres 61/2024 Pasal 18 ayat (7) Badan usaha milik negara dan Pelaku usaha lainnya yang melakukan impor dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib

menyampaikan laporan distribusi melalui Sinas NK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (8) dalam hal menu atau fitur penyampaian laporan distribusi dalam Sinas NK belum tersedia, penyampaian laporan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem elektronik pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

- b) Direktorat Bapokting menganalisis adanya penurunan pelaporan perusahaan distributor daging sapi dari 43 perusahaan pada tahun 2023 menjadi 37 perusahaan pada tahun 2024, sehingga dilakukan permintaan data laporan distribusi ke Direktorat Impor yang berasal dari penarikan data realisasi distribusi di Sinas NK yang terintegrasi dengan sistem Intrade Kemendag. Tujuannya untuk menyandingkan dan melihat apakah penurunan pelaporan itu karena ada perusahaan yang menganggap cukup hanya melapor ke Sinas NK dan tidak melapor lagi ke Bapokting atau memang di lapangan terjadi penurunan perusahaan distributor daging sapi. Rentang waktu data yang dimohon Direktorat Bapokting adalah selama satu tahun 2024.
- c) Namun penarikan data realisasi distribusi pada sistem INATRADE hanya dapat dilakukan maksimal dalam kurun waktu 1 bulan. PDSI Kemendag membatasi hal tersebut dikarenakan detail data realisasi distribusi yang banyak dan cukup besar.
- d) Bapanas menyampaikan bahwa pelaporan data realisasi distribusi oleh importir ke Bapanas juga mengalami penurunan karena di awal juga Bapanas menyampaikan ke importir bahwa pelaporan ke Bapanas bersifat sementara sampai sistem di Sinas NK siap digunakan. Oleh karena itu ada kemungkinan sebagian dari perusahaan importir yang sudah melakukan pelaporan ke Sinas NK tidak lagi melaporkan ke Bapanas.
- e) Dalam hal realisasi distribusi atas impor barang tertentu, LNSW hanya mengakomodir form untuk pengisian data pelaporan dan data tersebut langsung dikirimkan ke INATRADE Kemendag. LNSW belum menyediakan dashboard olah data ataupun summary terkait pelaporan realisasi distribusi, sehingga pelaporan tersebut belum dapat dilihat oleh Bapanas.
- f) Rencana Tindak Lanjut: Perwakilan Direktorat Impor Kemendag akan menyampaikan ke pimpinan bahwa ada permohonan akses data realisasi distribusi impor dari Direktorat Bapokting Kemendag dan Bapanas untuk selanjutnya dibahas dalam pertemuan lanjutan.

11. Rakortas Pembahasan Pembelian Gabah oleh Perum Bulog

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan harga pembelian gabah oleh perum bulog, membahas ketersediaan bahan pangan, serta isu lainnya. Pertemuan ini dipimpin oleh Menko Bidang Pangan dan dihadiri oleh Kepala Bapanas, Menteri Pertanian, Wakil Menteri BUMN, Direktur Perum Bulog, Perwakilan Menteri Keuangan, Perwakilan Menteri Perdagangan, dan Perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Perum Bulog harus menyerap gabah petani secara optimal dengan harga GKP yang telah ditetapkan per tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp 6.500,-/kg
- b) Pembelian beras (HPP) di gudang Perum Bulog sebesar Rp 12.000/Kg - Rp 12.250/Kg.
- c) Target penyerapan beras untuk Cadangan pangan beras pemerintah oleh Perum Bulog tahun 2025 sebesar 3 (tiga) juta Ton.
- d) Diputuskan penugasan kepada BUMN di bidang pangan untuk pengadaan impor daging kerbau dalam rangka CDRP sebesar 100.000 Ton.
- e) Ketersediaan bahan pangan, khususnya gula dan minyak goreng di pasar cukup, namun harga gula dan Minyakita di pasar lebih tinggi dari HET, sehingga K/L terkait perlu mengevaluasi penyebab tingginya harga gula dan Minyakita.
- f) Rencana Tindak Lanjut : Badan Pangan Nasional akan menugaskan BUMN di bidang pangan untuk penugasan impor daging kerbau sebesar 100.000 Ton.

12. Rakornis Evaluasi Pelaksanaan NK Daging Lembu

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan NK daging lembu tahun 2025 dengan K/L terkait. Pertemuan ini dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Luar Negeri dan dihadiri oleh Direktur Kesmavet Kementan, Direktur Logistik KKP, Direktur Impor Kemendag, Direktur IMHLP Kemenperin, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Direktur Efisiensi dan Proses Bisnis LNSW, dan Perwakilan Direktur PLDK LNSW. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Total impor daging lembu tetap 180.000 Ton namun akan dibagi menjadi penugasan BUMN pangan dan reguler (swasta). Terdapat penambahan impor penugasan BUMN pangan sebesar 100.000 Ton sehingga total impornya menjadi 280.000 Ton, namun apabila mengambil opsi ini perlu dukungan data antara ketersediaan dan kebutuhan.

- b) Kemendag menyampaikan bahwa PI untuk daging lembu konsumsi reguler belum ada yang diterbitkan.
- c) Bapanas menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi necara pangan daging lembu 2025, ketersediaan dapat memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun 2025 dan ketersediaan ini sudah memperhitungkan adanya impor 180.000 Ton sesuai penetapan NK tanggal 9 Desember 2024, namun demikian perlu mengantisipasi stok untuk 3 bulan awal tahun 2026 karena HBKN diperkirakan jatuh pada bulan Februari 2026 melalui penambahan impor daging penugasan BUMN atau impor sapi bakalan.
- d) Kementan menyampaikan bahwa apabila impor ditambah maka akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak akan jatuhnya harga ternak dan daging.
- e) Berdasarkan data yang ada opsi yang mungkin ditawarkan adalah total impor daging lembu tetap 180.000 Ton hanya saja akan dibagi untuk penugasan BUMN dan reguler (swasta). Pembagian alokasi akan ditentukan pada Rakor Eselon I.
- f) Perlu adanya bahasa yang sama antar K/L kepada publik terkait pengalihan alokasi 180.000 Ton yang dicantumkan pada risalah rapat.
- g) Rencana Tindak Lanjut: kesepakatan rapat akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pembahasan pada Rakornis Eselon I dan Rakortas di bulan Februari 2025.

b). Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan

1. Rapat Koordinasi Terbatas Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan tentang Pemberlakuan HPP, Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan SPHP

apat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Pangan diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 6 Januari 2025. Rakortas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional serta Menteri bidang pangan/perwakilan. Rakortas merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 23 dan 30 Desember 2024 antara lain terkait SPHP Gabah Beras, HPP Jagung, Bantuan Pangan, dan Penyaluran SPHP Beras. Poin penting hasil Rakortas antara lain sebagai berikut:
 - a) Pemberlakuan HPP Gabah dan Beras Rp 6.500/kg mulai 15 Januari 2025;
 - b) Pemberlakuan HPP Jagung Rp 5.500/kg mulai 1 Februari 2025 saat masuk masa panen raya jagung;

- c) Pemerintah melalui Perum BULOG akan menyerap gabah dan jagung petani yang tidak terserap pasar;
- d) Bantuan Pangan Beras untuk 16 juta keluarga penerima bantuan pangan ditambah 4 bulan, waktu akan dibahas dalam Ratas bersama Presiden RI;
- e) Penyaluran SPHP Beras ditambah 1.500.000 ton, SPHP Jagung 250.000 ton, dan SPHP Kedelai 100.000 ton yang diprioritaskan di bulan-bulan defisit, waktu akan dibahas di Ratas bersama Presiden RI; dan
- f) CJP Jagung sebesar 750.000 ton disalurkan melalui pasar umum dengan mekanisme lelang harga terbaik.faruq



2. Rapat TL Reviu atas LHR Penyaluran CPP SPHP Jagung

Beberapa poin penting Rapat Koordinasi TL Reviu atas LHR Penyaluran CPP SPHP Jagung yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut:

- a) Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP tentang penyaluran CPP SPHP Jagung tahun 2023-2024. Dalam LHR tersebut, terdapat koreksi negatif 36.093 ton atau Rp 26,53 miliar.
- b) Beberapa temuan berdasarkan LHR diantaranya:
 - Penyaluran kepada 14 koperasi yang tidak dilengkapi dokumen badan hukum dan NIB. Klasifikasi badan usaha dan NIB tidak sesuai dengan bidang peternakan (volume 32.152 ton atau Rp 23,92 miliar);
 - Peternak tidak sesuai kriteria yang dapat melakukan self mixing (volume 20 ton atau Rp 15,02 juta);
 - Praktik bagi rata dianggap oleh BPKP tidak sesuai dengan aturan (volume 3.040 ton atau Rp 1,98 miliar);
 - Peternak yang tidak terdaftar di SK Kementan;

- Peternak menerima melebihi dari ketentuan yang disebabkan kelebihan pagu, keanggotaan ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik (volume 875,24 ton atau Rp 620,18 juta).
- c) Dit. Bitpro Kementan, data ganda terkait anggota koperasi sudah diminimalisir dengan melakukan verifikasi dan validasi, terkait data ganda/mirip yang diusulkan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat. Persyaratan NIB yang basisnya KBLI tidak diatur klasifikasi spesifik bidang peternakan dalam Juknis SPHP Jagung.
- d) Koperasi PINSAR yang menjadi temuan bisa jadi sudah berbadan hukum dengan menginduk ke PINSAR Pusat, namun demikian hal tersebut perlu disiapkan data pendukung yang menerangkan asosiasi PINSAR Wilayah menginduk pada Koperasi/Asosiasi PINSAR Pusat.
- e) Kementan siap melakukan penelusuran dari kelengkapan dokumen badan hukum dan NIB termasuk penelusuran data ganda/mirip yang banyak terjadi pada SK I dan II.
- f) Kementan menyampaikan terkait pengertian *self mixing* secara teknis, yang pertama yaitu *self mixing* dengan membeli konsentrat dari pabrik dan *self mixing* yang membuat konsentrat secara mandiri. Keduanya diperbolehkan dan dianggap merupakan proses *self mixing*. Selain itu tidak semua peternak melakukan praktik tersebut, tergantung kebiasaan, efektifitas, dan efisiensi biaya.
- g) PPK CPP Bapanas, perlu menjelaskan secara langsung terkait corrective action dalam forum yang dihadiri pihak-pihak terkait.
- h) Div. POPP Perum BULOG, sesuai Surat Direktur Utama Perum BULOG agar *punishment* tidak semua terkait rupiah, tapi dengan saran-saran perbaikan. Selain itu terkait peternak nakal perlu diberikan teguran dan sanksi untuk kedepannya.
- i) Satgas Pangan POLRI, perlu menyiapkan terkait data dari atas ke bawah agar dapat menyinkronkan serta perlu menengok regulasi yang menjadi acuan dari pemeriksaan BPKP.
- j) Inspektorat Bapanas, agar poin-poin yang dapat diperbaiki internal sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu. Jangan sampai ada dokumen lain yang menguatkan NIB KBLI berjenis peternakan.
- k) Tindak Lanjut:
- Bapanas akan bersurat kepada Dirjen PKH Kementan untuk permohonan dukungan kelengkapan data dan informasi terutama terkait dengan Badan Usaha NIB/KLBI asosiasi/koperasi yang menaungi peternak dalam proses

teknis distribusi jagung serta penjelasan lengkap terkait kewajiban peternak untuk melakukan *self mixing*.

- Bapanas akan bersurat kepada PINSAR Pusat untuk memberikan penjelasan tentang AD/ART, Badan Hukum, NIB/KLBI, dan lainnya yang mendukung bahwa PINSAR Daerah (Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara) merupakan bagian dari dan/atau naungan dari PINSAR Pusat.
- Bapanas akan menyampaikan surat pemberitahuan dan teguran kepada peternak yang masuk dalam catatan yang melakukan praktik bagi rata dengan komposisi tertentu (Lampung 20%), serta adanya nama ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik.



3. Rakor HPP Jagung

Rapat Koordinasi SPHP Jagung yang dilaksanakan secara *Hybrid* pada tanggal 9 Januari 2025. Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Direktur SPHP, Bapanas dihadiri secara luring oleh Ketua Umum GPMT, dan Ketua Pinsar Indonesia, serta dihadiri secara daring oleh Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan, Kantor Staf Presiden, perwakilan Ombudsman RI, perwakilan Sekretariat Dukungan Kabinet, Asdep SPHP Kemenko Bidang Pangan, perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Perwakilan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, perwakilan Dirjen PKH Kementan, perwakilan Inspektorat Bapanas, perwakilan BPS, satgas pangan

POLRI, perwakilan Perum BULOG, perwakilan dinas pangan provinsi dan kab/kota, serta perwakilan asosiasi/koperasi peternak/petani. Beberapa pint hasil pertemuan:

- a) Kementan melaporkan berdasarkan data KSA BPS, panen jagung periode Januari – Februari 2025 naik sekitar 1,1 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Panen raya jagung akan terjadi pada bulan Maret-April 2025, sehingga Perbadan HPP Jagung diharapkan sudah terbit sebelum panen raya untuk melindungi petani. Selain itu, petani sulit menghasilkan Jagung Kering Pipil (JKP) dengan ka 14% sehingga diperlukan rafaksi untuk memudahkan BULOG dalam melakukan pembelian.
- b) Kementan menyampaikan terkait kelengkapan dan pembaharuan data peternak termasuk penambahan data NIK dan KK dengan melakukan verifikasi kembali yang lebih baik secara berjenjang dari dinas di daerah sampai Kementan. Selain itu, perlu dukungan dan rekomendasi dari dinas daerah terkait kebenaran data dari asosiasi/anggotanya yang akan untuk ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian tentang BNBA penerima SPHP jagung. Populasi ternak diharapkan harus sesuai dengan kondisi riil di kandang.
- c) Ketua umum GPMT menyampaikan stok saat ini 1,2 juta ton (kebutuhan 48 hari). Usulan HPP Jagung: (a) HPP regional sentra peternak (Medan, Lampung, Jateng, Jatim, Makassar) dan non sentra peternak (Gorontalo dan NTB) dengan pengurangan untuk ongkos distribusi; b) Usulan rafaksi harga jagung dengan nilai konversi penurunan volume 1,5% yg terdiri dari 1,2% untuk setiap kenaikan 1% ka dan 0,3% susut, benda asing dan kotoran.
- d) Asosiasi/Koperasi/Peternak menyoroti standarisasi dan sensitivitas alat tester kadar air sehingga tidak ada perbedaan ka di petani, BULOG dan pedagang/pabrik pakan. Sertifikasi lulus uji tera perlu menjadi syarat untuk mitra BULOG. Selain itu implikasi terhadap harga di peternak perlu diseimbangkan melalui regulasi Harga jagung di tingkat peternak.
- e) Ombudsman RI menyampaikan usulan di dalam RPerbadan HPP dan rafaksi jagung terkait unsur-unsur partisipasi publik siapa saja yang terlibat. Selain itu, perlu adanya kalibrasi alat ukur kadar air setiap tahun sekali.
- f) BULOG menyampaikan terkait dengan lokasi penetapan harga agar memperhatikan biaya lain-lain hingga adanya penentuan harga gudang BULOG, standar kualitas yang terkait dengan sarpras yang dimiliki oleh BULOG, dan pengukuran kadar air dengan alat yang sudah ditera.
- g) BPS menyampaikan catatan terkait KSA, dimana hasil KSA masih angka sementara (amatan November) untuk amatan desember akan disampaikan 20 Januari 2025,

maka produktivitas untuk September-Desember 2024 masih menggunakan angka 5 tahun ke belakang (2019 – 2023).

- h) Kemenkeu menyampaikan pemberlakuan HPP di tingkat petani dapat meningkatkan motivasi petani untuk menanam jagung. Selain itu, perhitungan dampak kenaikan harga jagung terhadap inflasi akan disimulasikan menyusul oleh tim BKF.
- i) Sesdukab menyampaikan HPP Jagung sama seperti HPP Gabah ada di petani dan gudang BULOG. Perlu konsultasi ke Kemenkumham terkait pengaturan melalui Perbadan atau cukup dengan SK Kabadan.
- j) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan, KSP menyampaikan bahwa pemberlakuan HPP ditujukan untuk mengatur harga pembelian oleh pemerintah c.q. Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG. Namun, dalam pembuatan regulasi tersebut supaya dibuat lebih komprehensif untuk memitigasi hal-hal teknis yang belum termuat di dalam RPerbadan, seperti kapasitas gudang dan mesin *dryer* yang dimiliki BULOG yang terbatas dan akibatnya terhadap kualitas jagung.
- k) Deputi KSP Bapanas menyampaikan perlu penyesuaian Juknis SPHP Jagung terkait keakuratan data peternak. Selain itu, pemberlakuan HPP dan rafaksi jagung akan berlaku untuk pembelian pemerintah, berapapun produksi petani maka akan diserap BULOG, namun mempertimbangkan mekanisme perdagangan secara normal, maka harus ada antisipasi untuk menjaga stabilisasi harga baik di petani maupun di peternak. Oleh sebab itu, momentum ini merupakan kesempatan BULOG bertransformasi untuk pembenahan kapabilitas infrastruktur dan SDM, sehingga mendapat harga yang wajar, untuk CPP produksi dalam negeri.
- l) Tindak Lanjut:
 - Konsultasi kemenkumham terkait penetapan HPP dan Rafaksi jagung melalui Perbadan atau SK Kabadan.
 - Finalisasi perhitungan rafaksi harga jagung.
 - Finalisasi pembahasan draf Perbadan/Keputusan Ka Badan tentang HPP dan Rafaksi Harga Jagung.
 - Pembahasan dan penetapan regulasi terkait seperti Juknis pengadaan CJP (Pengelolaan CJP) dan Juknis SPHP Jagung serta Juknis penyaluran CJP melalui mekanisme komersial.

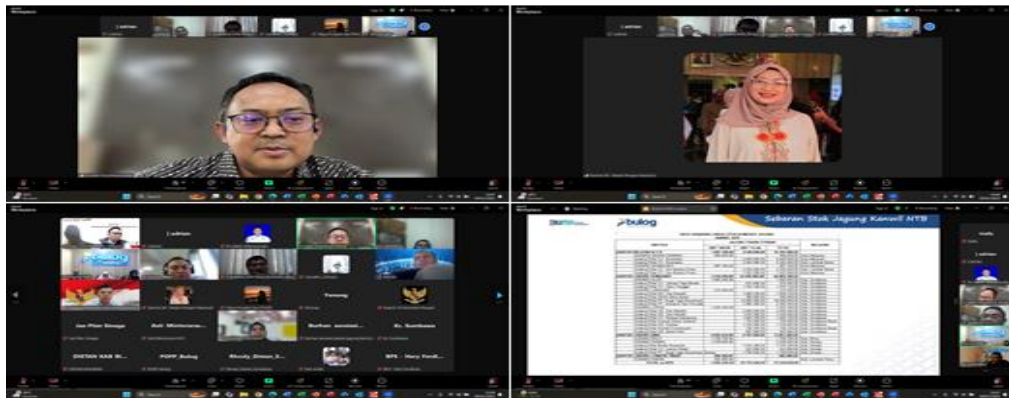


4. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Distribusi Jagung Nasional

Rapat dilaksanakan pada Kamis, 9 Januari 2025 dipimpin oleh Asdep Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan dihadiri oleh Asdep Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Asdep Logistik Pangan Dalam Negeri, Dir. DCP Bapanas, perwakilan Dit. Serealisa Kementan, Dit. PPHTP Kementan, Dinas Pertanian Kab. Bima, Dinas Pertanian Kab. Sumbawa, Dinas Pertanian Kab. Dompu, Dinas Ketahanan Pangan Prov. NTB, Asosiasi Jagung Kab. Bima, serta Tim Dit. SPHP Bapanas.

- a) Rakornis membahas sistem distribusi jagung dalam rangka persiapan panen raya yang akan segera terjadi di NTB.
- b) Panen raya di NTB diproyeksikan pada bulan Februari, Maret, dan April. Beberapa kendala yaitu gudang di NTB tidak mampu menampung dan terjadi antrian ekspedisi sehingga jagung banyak yang terlambat disalurkan. Selain itu para penyedia jasa logistik menetapkan tarif sendiri sehingga terjadi kenaikan biaya transportasi.
- c) Selain itu saat ini masih terdapat sisa stock jagung di gudang BULOG NTB sebesar 51 ton dan relatif tidak bergerak. Hal ini dikarenakan harga di pasar saat ini Rp 5.300-5.500/kg sehingga harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 5.500/kg belum bisa menjadi daya tarik.
- d) Distribusi jagung di NTB dipengaruhi infrastruktur transportasi, selain itu dikarenakan tidak terdapat pabrik pakan, sehingga disarankan adanya perbaikan infrastruktur transportasi serta subsidi transport. Perbaikan tata kelola pelabuhan diperlukan untuk bisa memberi ruang pada saat pengiriman jagung sehingga distribusi jagung dapat maksimal.
- e) BULOG juga diharapkan segera melakukan distribusi agar dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang BULOG yang terbatas dan tidak terjadi penumpukan di gudang BULOG.

- f) Selain itu perlu memperhatikan handling pascapanen agar kualitas jagung sesuai. Produk dengan KA tidak tercapai disesuaikan harganya sesuai dengan rafaksi dan perlu sosialisasi ke petani. Saat ini masih banyak petani yang belum mengetahui tentang konsep rafaksi sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut.
- g) Tindak lanjut:
- Pemetaan gudang-gudang yang ada sehingga penyimpanan di gudang dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran.
 - Perlu menyiapkan alternatif pergudangan selain dari gudang BULOG atau mitra BULOG.
 - Perlu memperhatikan teknologi pascapanen jagung agar kualitas jagung sesuai dengan spesifikasi.
 - Perlu perbaikan tata kelola distribusi antrian di Pelabuhan agar penyaluran bisa lebih maksimal.
 - Akan dilakukan rapat lanjutan di tingkat atas serta kunjungan ke NTB secara langsung.



5. Rakor SPHP Cabai

Rapat Koordinasi SPHP Cabai yang dilaksanakan secara *Hybrid* pada tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

- Rapat dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi pasokan dan harga cabai serta merumuskan rekomendasi aksi stabilisasi pasokan dan harga cabai.
- Latar belakang rapat mencermati perkembangan harga cabai khususnya cabai rawit merah (CRM) dan cabai merah keriting (CMK) yang terus meningkat dan sebagian di atas HAP baik di tingkat produsen dan/atau konsumen serta menindaklanjuti surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Nomor: D-10/RC.310/D.4/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal perkembangan harga cabai.
- Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan,

- Harga CRM dan CMK pada periode September – Desember 2024 mengalami harga anjlok baik di tingkat produsen maupun konsumen.
- Harga CRM dan CMK berangsur naik setelah 1 Januari 2025 dan terpantau per tanggal 7 Januari 2025 (harga CMK : Rp 59.747/kg, harga CRM : Rp 73.845/kg) setelah melewati Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen (Rp 35.000-Rp. 55.000/kg).
- Berdasarkan informasi di PIKJ diketahui ada penurunan pasokan (pasokan CMK tanggal 7 Januari 2025 sebesar 19 ton/hari atau turun 24% dibandingkan pasokan hari sebelumnya; untuk CRM tanggal 7 Januari 2025 sebesar 14 ton/hari atau turun sebesar 22,22% dibandingkan pasokan hari sebelumnya).
- Hal ini berdampak signifikan terhadap kenaikan harga dimana terpantau harga di PIKJ per tanggal 7 Januari 2025 untuk CMK sebesar Rp 45.000/kg (masih dalam batas interval HAP), sedangkan untuk CRM sebesar Rp 85.000/kg (54,5% di atas HAP). Tingginya harga CRM di Pasar Induk Kramat Jati akan memberikan dampak terhadap harga CRM di pasar turunannya (pasar eceran terpantau Rp 117.738/kg atau 113% di atas HAP dan perlu dilakukan intervensi).
- Oleh karena itu perlu dilaksanakan koordinasi untuk mengantisipasi pasokan dan harga menjelang HBKN Puasa – Idul Fitri (Bulan Maret 2025).

d) Asosiasi Cabai,

- Telah terjadi kenaikan harga cabai khususnya CRM secara merata di seluruh Indonesia. Terpantau harga CRM Ori Super tanggal 8 Januari di koperasi Magelang sebesar Rp 73.000-77.000/kg dan CMK super Rp 45.000/kg, tingginya harga CRM disebabkan gangguan di sisi produksi.
- Sebagai akibat cuaca ekstrim di berbagai wilayah sentra cabai yang berlangsung selama 1 bulan, hal tersebut mengganggu pertanaman cabai sehingga tidak bisa panen. Diperkirakan sekitar 70% luas area sentra di Jateng terdampak, kecuali di lahan pasir dan kondisi ini terpantau secara merata terjadi di seluruh area di Indonesia.
- Dampak dari cuaca ekstrim hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan bunga pada tanaman cabai rontok karena terkena guyuran hujan yang deras dan berlangsung lama secara langsung sehingga diperkirakan menyebabkan penurunan produktivitas hingga 50%.
- Berakhirnya masa panen cabai di wilayah sentra Jawa Timur, seharusnya bisa diikuti dengan masa panen di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun saat ini karena kondisi cuaca hujan ekstrim maka di wilayah Jateng dan Jabar belum

masuk musim panen yang biasa terjadi di awal tahun sehingga ada waktu berkurangnya pasokan.

- Beberapa petani telah melakukan penanaman kembali dengan benih cabai genjah (masa panen lebih cepat).
- Sehingga kedepan diusulkan agar dapat dibantu fasilitas screen house dan bantuan ajir untuk mengatasi kondisi hujan di tanaman cabai.
- Petani mengharapkan dukungan fasilitas screen house untuk pengendalian cuaca
- Telah terjadi serangan penyakit (layu fusarium dan layu bakteri) yang diakibatkan intensitas hujan yang tinggi sehingga berdampak pada terganggunya produksi.

e) Deputi II Bidang Perekonomian KSP,

- Kondisi fluktuasi harga komoditas cabai sangat tinggi oleh karena itu perlu disikapi dengan seksama dan tidak perlu reaktif ketika terjadi harga tinggi. kondisi naiknya harga cabai baru berlangsung kurang dari 1 minggu sedangkan jatuhnya harga cabai sebelumnya sudah berlangsung selama 4 bulan.
- Namun demikian diperlukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mengurangi disparitas harga cabai antar daerah.

f) Paguyuban Pedagang Cabai di PIKJ,

- Saat ini terpantau di PIKJ pasokan CRM berasal dari Temanggung, Sleman, Takengon (Aceh), dan Bulukumba (Sulsel). Adapun pasokan CMK berasal dari Pacitan (Jatim), Banjar, Temanggung, Sleman, Takengon (Aceh), dan Bulukumba (Sulsel). Hal ini menggambarkan pasokan CRM mulai berkurang dibandingkan CMK.
- Harga CRM di PIKJ terpantau mengalami kenaikan. Saat ini harg CRM Rp75.000-88.000/kg dan CMK Rp45.000 -47.000/kg. kondisi ini juga akan mengakibatkan harga di tingkat pasar eceran lebih tinggi.

g) Kementan,

- Berdasarkan pelaporan dari petani champion cabai Indonesia diketahui terjadi gangguan produksi sehingga berdampak pada kenaikan harga cabai saat ini.
- Faktor penyebab gangguan produksi diantaranya intensitas hujan tinggi, banjir, angin puting beliung, dan juga longsor di beberapa sentra di Sukabumi.

- Ditjen Hortikultura telah menyiapkan 24.000 benih cabai yang dapat digunakan untuk pergantian tanam yang mengalami gangguan.
- a. Langkah aksi jangka pendek dapat dilakukan pasokan dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat untuk mengendalikan harga cabai di wilayah Jakarta.
- h) Asdep Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Bidang Pangan menyarankan agar para petani champion cabai dapat menyampaikan kondisi pasokan dan harga cabai di beberapa series *roadshow* rakortas Bapak Menko Pangan di beberapa Provinsi.
- i) Perwakilan Ombudsman mengusulkan Kementerian Pertanian dan K/L lainnya dapat membantu penguatan sarana prasarana di tingkat hulu serta pengefektifan kembali tata kelola/*supply chain* cabai agar dapat mengurangi disparitas harga cabai di antara produsen dan konsumen.
- j) Rekomendasi Tindak Lanjut:
 - Ditjen Hortikultura akan melakukan koordinasi dengan para petani champion cabai Indonesia
 - Petani Champion Cabai Indonesia akan meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk penyediaan cabai dengan harga yang lebih murah untuk konsumen langsung.
 - Bapanas akan mengamati perkembangan harga cabai satu minggu ke depan dan akan mempersiapkan aksi seperti fasilitasi distribusi pangan (FDP) dan penjualan cabai di lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) apabila harga konsisten naik.



6. Sosialisasi dan Pembahasan Perubahan HPP Gabah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras
 Sosialisasi dan Pembahasan HPP dan Rafaksi Gabah dan Beras yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 di Aston Simatupang disampaikan sebagai berikut:
 - a) Rapat dilakukan dalam rangka tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI pada 30 Desember 2024, hasil dari Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Kepala Lembaga bidang Pangan tanggal 6 Januari 2025 bahwa Pemerintah akan menaikkan HPP Gabah Tk. Produsen menjadi Rp 6.500/kg dan rafaksi harga beras di gudang Perum Bulog menjadi Rp 12.000/kg berlaku mulai 15

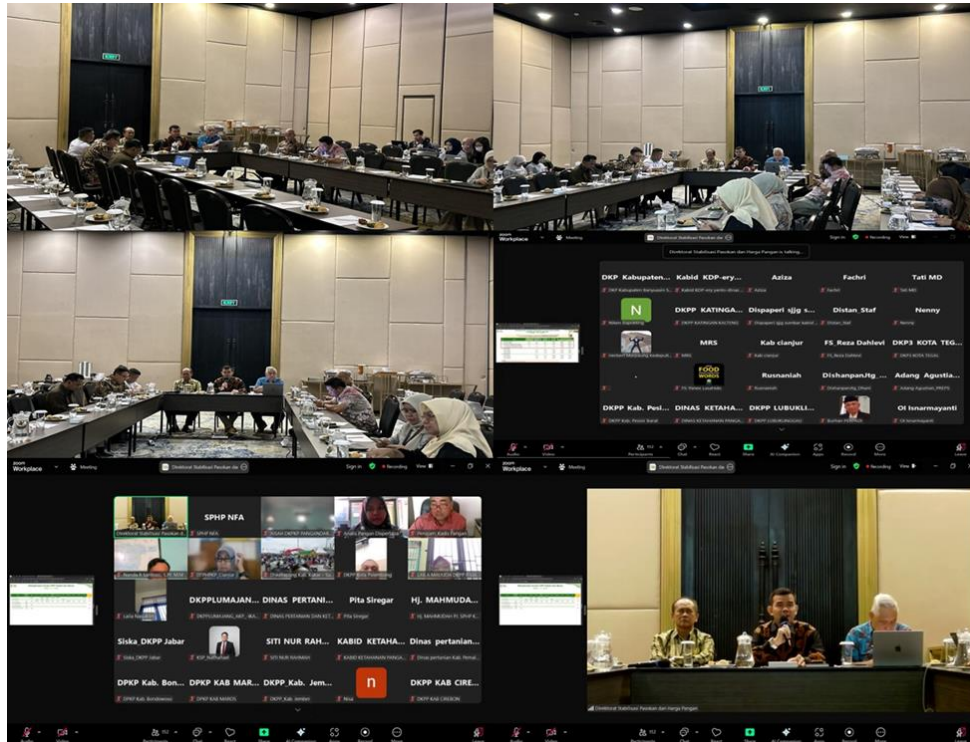
Januari 2025. Selain itu, juga telah disepakati minimal jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola yaitu 2.500.000 ton dan 1.200.000 ton untuk minimal Stok CBP akhir tahun.

- b) Pembahasan terkait reviu HPP Gabah dan Beras sebelumnya telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan K/L dan Asosiasi/pelaku usaha perberasan. Usulan harga GKP tingkat petani berdasarkan hasil rapat koordinasi pada bulan Desember 2024 rata-rata Rp 6.500 – 7.000/kg.
- c) Melalui pembaruan kebijakan HPP Gabah dan Beras diharapkan kesejahteraan petani meningkat sehingga mendorong minat petani untuk meningkatkan produksinya.
- d) Bentuk regulasi perubahan HPP Gabah dan Beras saat ini dapat berupa Keputusan Kepala Badan dan tidak harus Peraturan Badan, karena sebelumnya sudah diatur dalam Perbadan Nomor 4 Tahun 2024.
- e) Direktorat Statistik Tanaman Pangan BPS, perubahan kebijakan HPP didasarkan dari beberapa hal salah satunya struktur ongkos. Usulan HPP Rp 6.500/kg searah dengan kondisi aktual di lapangan dan sesuai usulan BPS. Kebijakan HPP perlu pertimbangan dan kehati-hatian karena beras berdampak langsung pada inflasi dan juga sebagian petani juga merupakan konsumen beras. HPP Rp 6.500/kg cukup moderat untuk mengakomodir peningkatan kesejahteraan petani dan di sisi lain inflasi di konsumen masih dapat dijaga.
- f) Ketua Umum Perpadu, pemberlakuan HPP Gabah dan Beras yang baru sangat tepat waktunya sebelum panen raya sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan dengan baik perubahan tersebut seperti kesiapan modal dan lainnya. Pemerintah dan asosiasi/pelaku usaha harus menyiapkan strategi agar kenaikan HPP dapat benar-benar dinikmati manfaatnya oleh petani. Diharapkan rendemen beras yang dihasilkan petani bisa lebih besar 56% dengan HPP Rp 6.500/kg agar penggilingan tidak merugi dan harga beras di gudang Bulog sesuai HET Rp 12.500/kg. Perpadu akan menjalin kerjasama dengan BULOG dalam penyerapan gabah.
- g) Wakil Ketua Umum HKTI, HKTI mengapresiasi kenaikan HPP dan akan mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Kedepan perlu ada upaya bersama untuk melakukan efisiensi rantai pasok beras karena saat ini banyak middle man. Penetapan harga Rp 6.500/kg perlu diikuti kesiapan kemampuan dan kapasitas kelembagaan penyerapnya (BULOG). Kolaborasi pelaku usaha petani, penggilingan, dan Perum BULOG termasuk akses kredit untuk permodalan. Selain itu, pendistribusian alokasi pupuk khususnya untuk CPCL perlu dioptimalkan dengan pendekatan berbasis peta lahan.
- h) Perpadu Jakarta, perlu dipertimbangkan kembali terkait penetapan kualitas gabah karena kadar hampa 10% untuk HPP GKP Rp 6.500/kg terlalu tinggi, dan akan sulit

untuk menghasilkan beras dengan harga Rp 12.000/kg. Diusulkan kadar hampa maksimal 3-5% sehingga rendemen beras dapat lebih besar 56%.

- i) Ketua Umum SPI, menyambut baik kenaikan HPP karena saat ini petani padi masih kurang sejahtera dibandingkan dengan petani komoditas lain. Masalah utama adalah penguasaan lahan petani sangat terbatas (petani gurem) dan produktivitas yang rendah. Selain itu pembangunan irigasi juga harus dioptimalkan agar lebih merata.
- j) Direktorat PPHTP Kementan, Penerbitan HPP sebelum panen raya sudah tepat. Peningkatan HPP merupakan salah satu instrumen untuk menuju kemandirian pangan sesuai arahan Presiden. Terkait kadar hampa, saat ini di petani berkisar 5 – 10%. Kadar hampa tersebut dipengaruhi kualitas gabah dan mekanisasi pertanian. Jika menggunakan mesin Combine kadar hampa 2 – 5%, mesin tracer 5 – 10%. Selain itu terkait butir patah sebesar 20% perlu dipertimbangkan kembali. Ada kekhawatiran jika harga beras Rp 12.000/kg maka harga beli GKP di bawah HPP. Perlunya Pengawasan implementasi penyesuaian HPP beras.
- k) Kepala Pusat PSEKP Kementan, penetapan HPP agar dapat diimplementasikan dengan baik perlu disiapkan oleh Pemerintah dan Perum BULOG mengingat saat ini disinyalir serapan gabah oleh BULOG belum optimal. Hal yang perlu diantisipasi adalah saat ada keterbatasan serapan penggilingan dan serapan BULOG tidak optimal maka dapat membuat harga di petani jatuh.
- l) Perwakilan BRIN, perlu kesiapan lembaga penyerap untuk implementasi HPP. Dalam 2 tahun terakhir di bulan April-Mei ada kecenderungan harga di bawah HPP. Perhitungan HPP harus moderat menciptakan insentif bagi pelaku usaha/petani sekaligus menjaga harga beras di konsumen agar tidak terlalu tinggi.
- m) Perum BULOG, akan menyerap sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah. Kemungkinan ada kendala penyerapan beras di gudang BULOG karena akan sulit mendapatkan beras di angka HPP. Sesuai arahan Pemerintah, BULOG akan fokus di pengadaan GKP dan menyusun strategi penyerapan langsung GKP dari petani dan/atau penggilingan beras di mitra agar dapat bersaing dengan pelaku usaha besar. BULOG juga perlu dukungan untuk penyediaan alat pengeringan dan gudang karena fokus utama di GKP yang merupakan kali pertama bagi BULOG.
- n) Perwakilan Kantor Staf Presiden, konteks HPP utamanya adalah untuk melindungi harga di level petani sehingga tidak turun terlalu jauh saat panen raya. Waktu penetapan juga sudah tepat sebelum panen raya untuk segera dapat dilaksanakan untukantisipasi panen raya yang sudah dekat.
- o) Tindak Lanjut:

- Perhitungan Rafaksi GKP terkait kadar hampa dari Kementerian Pertanian, BRIN dan pelaku usaha yang dapat menjadi pertimbangan pada reviu HPP Gabah dan Beras berikutnya;
- Proses penetapan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang HPP dan Rafaksi Gabah dan Beras.



7. Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025

Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 yang dilaksanakan secara *Hybrid* pada tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

- Rapat sosialisasi dipimpin oleh Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan dihadiri oleh Deputy II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Kasatgas Pangan POLRI, Direktur SPHP, Direktur PPHTP Kementan, perwakilan K/L, perwakilan Perum BULOG, pelaku usaha, dan dihadiri secara *online* oleh perwakilan Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan Pinwil dan Pinca Perum BULOG selindo.
- Rapat dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Dirut Perum BULOG tentang Penugasan SPHP Beras Bulan Januari – Februari 2025 dan Kepbadan tentang Juknis SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025, serta Keputusan Ratas tanggal 26 November 2024 dan Rakortas tanggal 23 Desember 2024 sebagai dasar penyelenggaraan SPHP Beras Tahun 2025.

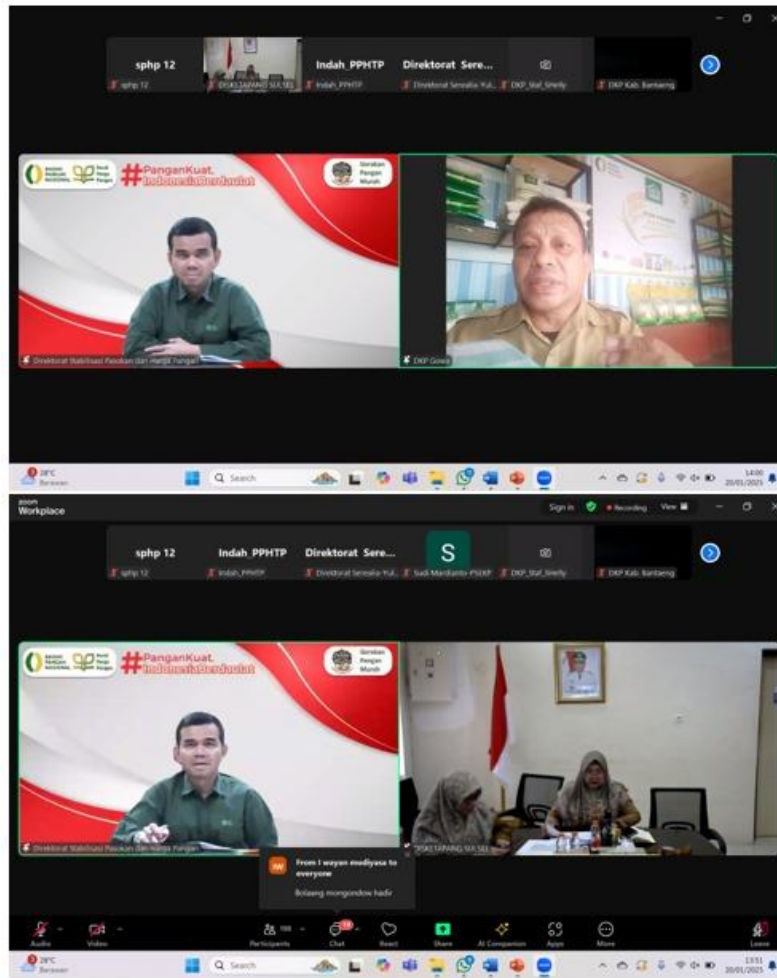
- c) Tahun 2025 Perum BULOG dalam melaksanakan penyaluran beras SPHP harus memperhatikan perkembangan harga komoditas beras pada Panel Harga Pangan khususnya wilayah Timur dan daerah 3TP yang diatas HET (warna merah pada peta Panel Harga Pangan) agar dilakukan penetrasi pasar dengan menambah volume penyaluran.
- d) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyaluran beras SPHP, Perum BULOG berkolaborasi dengan Dinas Pangan provinsi/kabupaten/kota agar berkolaborasi dengan OPD lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data mitra penyaluran beras SPHP 2025 serta melaksanakan penguatan intervensi SPHP Beras untuk memastikan penyaluran beras SPHP sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
- e) Pengadaan dan penyaluran SPHP Beras harus tepat waktu, tepat harga dan tepat lokasi mengingat implementasi regulasi HET Beras tidak mudah diterapkan di semua wilayah.
- f) Pelaku usaha pangan berkomitmen mendukung pelaksanaan penyaluran SPHP beras 2025 baik di pengecer maupun retail modern sesuai regulasi yang berlaku.
- g) Tindak lanjut:
 - Januari minggu ketiga akan dilaksanakan monev bersama terkait penyaluran beras SPHP di wilayah Timur melibatkan K/L dan Pemda (Gubernur, Walikota, Bupati).
 - Badan Pangan Nasional akan menyiapkan SK Tim Monev dengan melampirkan titik lokasi dengan mengacu pada informasi perkembangan harga beras pada panel harga pangan.



8. Rakor Tindak Lanjut Kepbadan HPP Gabah dan Beras

Beberapa poin penting yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Informasi yang dihimpun baik berdasarkan data dan informasi panel harga pangan dan informasi lainnya terkait kondisi perkembangan harga gabah/beras di tingkat petani, sehingga perlu disamakan persepsi untuk mengupdate sekaligus upaya mitigasi harga gabah/beras jangan sampai jatuh di petani.
- b) Mengacu pada Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan rafaksi beras yang mengatur antara lain: kadar air, kadar hampa, derajat sosoh, butir patah (broken) dan lainnya, sampai saat ini belum dapat dipenuhi petani. Oleh karena itu perlu pemberlakuan rafaksi gabah untuk dapat menyerap gabah petani.
- c) Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Panel Harga Pangan, beberapa daerah/wilayah dengan harga gabah di bawah HPP (42 kab/kota) dengan variasi sebaran yang sangat beragam. Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota agar melakukan konfirmasi data dengan enumerator panel harga pangan di wilayah/lokasi dimaksud untuk menyamakan persepsi penyebab harga gabah dibawah HPP antara lain: jenis, volume, lokasi, kondisi/kualitas gabah, dan hal lainnya.
- d) Tindak Lanjut:
 - Data dan informasi dari Dirjen TP Kementan akan sampaikan ke dinas pangan daerah untuk dilakukan klarifikasi dan validasi dengan data dan informasi enumerator yang lebih detail;
 - Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 terkait Perubahan HPP Gabah dan Beras ke Dinas, K/L, dan stakeholder terkait lainnya.
 - Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas dengan data yang lebih lengkap baik oleh dinas maupun berdasarkan data enumerator.



Gambar 8. Rakor Tindak Lanjut Kepbadan HPP Gabah dan Beras

9. Perkembangan Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Januari 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Beras Medium tingkat penggilingan, Cabai Merah Keriting tingkat petani, dan cabai Rawit Merah tingkat petani. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering tingkat peternak ($4,86\% < \text{HAP}$), Bawang Merah ($5,88\% < \text{HAP}$), Sapi (hidup) ($7,24\% > \text{HAP}$), Ayam Ras (hidup) ($8,56\% < \text{HAP}$), dan Telur Ayam Ras ($6,45\% < \text{HAP}$). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu GKP tingkat petani ($1,86\% < \text{HPP}$), GKG tingkat penggilingan ($5,63\% < \text{HPP}$), dan Kedelai Biji Kering ($14,34\% < \text{HAP}$).

Perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M5 Januari 2025 yaitu Sapi (hidup), Jagung Pipilan Kering, Bawang Merah, Ayam Ras (hidup), dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-

M5 Januari 2025 yaitu GKP petani, Beras Medium tingkat penggilingan, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah.

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Januari 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,61%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,25%>HET), Beras Medium Zona 3 (13,88%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (31,26%>HAP), dan Minyakita (12,26%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,30%>HET), Beras Medium Zona 1 (4,03%>HET), Jagung Tk Peternak (11,19%>HAP), dan Gula Konsumsi Indonesia Timur & 3TP (6,03%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Januari 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Januari 2025 terjadi pada komoditas Gula Konsumsi, Cabai Merah Keriting, Beras Premium, dan Beras Medium. Pantauan pada M5 Januari 2025, terdapat 256 Kab/Kota di Atas HET Beras Premium, terdapat 378 Kab/Kota di atas HET Beras Medium, terdapat 287 Kab/Kota di atas HAP Cabai Merah Keriting, dan terdapat 375 Kab/Kota di atas HAP Gula Konsumsi.

10. Bimbingan Teknis Aplikasi Baru Panel Harga Pangan

Bimbingan teknis aplikasi baru panel harga pangan dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 10 Januari 2025 secara daring yang diikuti oleh seluruh petugas verifikator tingkat kab/kota dan petugas enumerator tingkat provinsi. Kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi baru Panel Harga Pangan dan menginventarisir kendala – kendala yang dihadapi oleh petugas verifikator dan enumerator, serta melakukan praktik penginputan harga pangan secara langsung. Beberapa provinsi sudah dapat menginput 100% pada aplikasi baru Panel Harga Pangan yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Kendala yang dihadapi oleh verifikator dan/atau enumerator Ketika melakukan penginputan diantaranya adalah:

- Tidak bisa login: hal ini biasanya disebabkan oleh browser/mesin pencarian yang tidak sesuai, penggunaan password yang tidak tepat, dan/atau akun yang tidak terdaftar karena merupakan enumerator baru. Browser yang disarankan adalah *google chrome*, *internet explorer*, *mozilla firefox*.
- Tidak bisa melakukan simpan data: hal ini disebabkan oleh browser/mesin pencarian yang tidak sesuai dan/atau penggunaan link yang tidak tepat.

- Kesalahan penginputan atau double input: apabila terdapat enumerator yang salah menginput data harga, dapat dilakukan edit data, atau dilakukan verifikasi oleh verifikator. Apabila terdapat kesalahan penginputan data responden, maka edit dapat dilakukan oleh verifikator/PJ Provinsi pada menu master usaha.
- Tidak bisa ganti lokasi/lokasi tidak sesuai dan laporan foto tidak masuk.
- Absensi tidak masuk (sudah dilakukan penyesuaian oleh pengembang)
- Komoditas produsen tidak lengkap, kemungkinan karena kesalahan saat memilih komoditas produsen
- Ketika melakukan verifikasi dengan menggunakan hp, maka harus membuka data satu per satu, sehingga membutuhkan waktu lama.
- Absensi enumerator tidak masuk ke akun verifikator, hal ini karena absensi enumerator terekap pada admin provinsi.
- Kesalahan penginputan atau double input: apabila terdapat enumerator yang salah menginput data harga, dapat dilakukan edit data, atau dilakukan verifikasi oleh verifikator. Apabila terdapat kesalahan penginputan data responden, maka edit dapat dilakukan oleh verifikator/PJ Provinsi pada menu master usaha.
- Notifikasi jumlah responden tetap/tidak berkurang, padahal sudah melakukan input lengkap. Terkait hal ini dilakukan percobaan langsung.
- Saran untuk penginputan dengan aplikasi Panel Harga Pangan Baru ini yaitu adanya.
- penambahan waktu input (*cut off* di tas jam 1). Serta agar setiap responden tersimpan komoditas yang dijualnya, sehingga enumerator tidak memiliki komoditas setiap input.
- Permintaan penambahan jumlah enum konsumen mempertimbangkan enumerator konsumen menginput lebih dari 20 komoditas dengan minimal 3 responden setiap komoditasnya.
- Komoditas jika bisa tersimpan pada setiap responden, sehingga tidak perlu memilih komoditas setiap hari.



11. Rakor Inflasi Kemendagri

Rapat dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri, dan dihadiri langsung oleh narasumber Deputy KSP, Deputy BPS, dan Dir. SPHP Bapanas, serta dihadiri secara online oleh Kemendagri, Dir. STO Kementan, Kadiv. Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Dir. Pertimbangan Hukum Kejaksaan, Satgas Pangan, dan Mabes TNI, Kepala daerah provinsi dan kab/kota serta Forkopimda di seluruh Indonesia.

- a) Plt Sekjen Kemendagri menyampaikan Inflasi Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy), merupakan hasil dari koordinasi setiap pekan rapat pengendalian inflasi. Perum Bulog agar memprioritaskan penyaluran Beras SPHP di wilayah dengan harga masih tinggi.
- b) Deputy Perekonomian KSP menyampaikan komoditas dengan harga tidak aman: Minyakita, Bawang putih, Beras Premium dan Medium Zona 3. Perum Bulog agar melaksanakan SPHP di daerah dengan harga masih tinggi.
- c) Deputy BPS menyampaikan pada M2 Januari 2025, sebanyak 36 provinsi dan 321 kab/kota mengalami kenaikan IPH dari minggu sebelumnya. Komoditas penyumbang kenaikan IPH yaitu cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Kenaikan IPH terbesar di Sumatera oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras), di Jawa oleh cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daerah lainnya cabai rawit, cabai merah, dan Bawang Merah. Cabai Merah naik 34,55% dibandingkan Des 2024, namun masih berada pada zona normal. Harga Cabai Rawit hingga M2 Jan 2025 naik 42% dibandingkan Des 2024 Rp67.816/kg, berada di atas batas atas HAP. Harga Telur Ayam Ras naik 3,4% dari Desember 2024.
- d) Direktur SPHP Bapanas menyampaikan per tanggal 12 Januari 2025, Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian, di antaranya Kedelai Biji Kering (▼23,99%). Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HET/HAP di antaranya Cabai Rawit Merah (▲41,49%), Beras Premium Zona 3 (▲21,28%), Beras Medium Zona 3 (▲18,69%),

Bawang Putih (▲ 11,79%), dan Minyakita (▲ 11,09%). Penyebab kenaikan harga CRM diantaranya cuaca ekstrim (curah hujan tinggi, banjir, dan angin puting beliung) dan serangan hama OPT sehingga produksi turun serta terjadi penurunan pasokan cabai ke pasar/masyarakat. Rencana Aksi K/L bersama Petani Champion Cabai Indonesia dan Pemda antara lain dengan penyediaan cabai dengan harga petani, FDP dan dukungan Pemda untuk dukungan biaya transportasi dan subsidi harga jual di tingkat konsumen.

- e) Perum Bulog menyampaikan penyerapan gabah menerapkan standar. Realisasi pengadaan 2024 sebesar 1,2 juta ton. Rencana pengadaan 2025 sebanyak 3 juta ton. Rencana SPHP 2025 yaitu Januari (150 rb ton), Februari (150 rb ton), Maret (85 rb ton), April (56 rb ton), Mei (46 rb ton), Juni (78 rb ton), Juli (86 rb ton), Agustus (121 rb ton), September (104 rb ton), Oktober (140 rb ton), November (185 rb ton), dan Desember (295 rb ton).
- f) Direktur STO Kementan menyampaikan produksi bawang merah Januari 2025 meningkat sekitar 175 ribu ton, terjadi panen raya hampir di semua sentra bawang merah. Upaya pengamanan stok dengan penyerapan dan penyimpanan panen raya (cold storage dan penyerapan oleh pelaku pangan), percepatan tanam di 200 kab/kota sentra produksi, memastikan sarana dan prasarana bekerja dengan baik, serta pembuatan sentra baru. Produksi cabai di Januari turun yang disebabkan oleh cuaca ekstrim (banjir, curah hujan tinggi, longsor, angin kencang, serangan OPT), petani tidak merawat tanaman akibat psikologis harga cabai rendah 2024, dan beberapa sentra telah habis masa panen. Upaya kementan dalam pengendalian harga cabai di petani yaitu GPM, FDP, budidaya cabai di Greenhouse, optimalisasi SGH fasilitasi DAK (368 unit), dan gerakan budidaya cabai di pekarangan.
- g) Staf Ahli Kemendag menyampaikan per tanggal 12 Januari, masih banyak minyakita di berbagai wilayah yang dijual diatas HET Rp15.700/liter .Dalam rangka stabilisasi harga Minyakita, BUMN Pangan (IDFOOD, PPI) dan Perum Bulog dapat segera melakukan kerja sama dengan produsen Minyakita, menghimbau kepada produsen dan distributor memastikan ketersediaan Minyakita, serta mendorong Kemenkeu untuk merelaksasi kebijakan wajib pungut BUMN Pangan, sehingga dapat memperpendek rantai distribusi. Dinas di daerah agar melakukan pemantauan pemasangan banner Minyakita di toko yang menjual Minyakita, agar masyarakat teredukasi dengan kebijakan HET Minyakita Rp15.700/liter



12. Perkembangan pelaksanaan GPM periode Januari 2025

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota.

SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 telah dilaksanakan sebanyak 166 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 5 kali, provinsi sebanyak 13 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 148 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Desember 2024 sebanyak 9.547 kali dengan rincian Pusat sebanyak 236 kali, Provinsi sebanyak 1.537 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 7.774 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

13. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Berdasarkan laporan update tanggal 31 Januari 2025 realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen sebesar 61.908.932 kg dari target penyaluran Januari-Februari Tahun 2025 sebanyak 3.000.000.000 kg. Realisasi Penyaluran terdiri dari Pengecer sebesar 60.379.781 kg atau 97,53%, Satgas sebesar 1.064.834 kg atau 1,72%, Pemda sebesar 1,2% 309.545 kg atau 0,50% dan BUMN sebesar 154.772 kg atau 0,25%.

14. Menghadiri GPM Sulawesi Selatan

GPM Serentak Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025 di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. GPM dibuka oleh PJ Gubernur Sulsel, dan dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Prov Sulsel, Perwakilan Pangdam XIV Hasanuddin, perwakilan Kapolda Sulsel, perwakilan Kejati Sulsel, perwakilan Pangkoopsau II, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Pinwil Bulog Sulsel, Kepala BPS Sulsel, Kepala dinas yang menangani pangan kab/kota se-Sulsel, dan perwakilan Dit SPHP Bapanas.

- a) GPM dilaksanakan dengan melibatkan 22 mitra diantaranya Bulog, ID Food, Prima Freshmart, dan PT Fokus Ritel Indonesia, Distributor Sayur Malino, UMKM pangan, dan lainnya.
- b) Komoditas yang dijual yaitu Beras SPHP, Gula Pasir, Telur, Daging Ayam, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Besar dan bahan pangan lainnya.
- c) Antusias masyarakat cukup tinggi beberapa bahan pangan dijual dibawah harga pasar antara lain: Daging Ayam Rp 38.000/800 gr; Beras SPHP Rp 58.000/5 kg; Gula pasir Rp 17.500/kg; Minyakita (kemasan bantal) Rp 15.000/L; Cabai Rawit Merah Rp 55.000/kg, sementara di pasar Rp 60.000- 65.000/kg; Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting Rp 30.000/kg; Telur Rp 48.000/tray; Bawang Merah Rp 25.000- Rp 30.000/kg; dan Bawang putih Rp 40.000/kg.



15. Rapat Koordinasi kegiatan Gerakan Pangan Murah

Rapat Evaluasi Tahun 2024 dan Persiapan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Margo Depok pada tanggal 17-18 Januari 2025. Rapat koordinasi dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, perwakilan Biro PKH Bapanas, perwakilan Biro OSH, PPK Kedeputan KSP, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, perwakilan DKP Kota Tangerang, mitra vendor kegiatan SPHP GPM dan Event Organizer (EO) pelaksana GPM pusat. Hasil rapat sebagai berikut:

- a) Tahun 2024 Dinas Pangan di wilayah Jabodetabek telah melaksanakan kegiatan SPHP GPM menggunakan anggaran APBN, APBD dan mandiri/CSR. Rencana tahun 2025 untuk kegiatan SPHP GPM terus dimasifkan dan fokus pada replikasi kegiatan kios pangan baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
- b) Mitra vendor dan EO pelaksana kegiatan GPM berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban sesuai dengan Petunjuk Teknis SPHP GPM TA 2025.
- c) Tindak lanjut:
 - Akan dibuatkan infografis katalog produk-produk mitra vendor GPM sebagai sarana publikasi saat pelaksanaan kegiatan.
 - Akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja mitra vendor GPM dan EO.



16. GPM Pemuda Tani

Pelaksanaan GPM yang bekerjasama dengan Pemuda Tani HKTI diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada tanggal 21 Januari 2025 yang berlokasi di Depan Kantor Kelurahan Uritetu Jl. Slamet Riyadi Kota Ambon yang dihadiri Direktur SPHP, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Sekjen Pemuda Tani Indonesia HKTI, Lurah Uritetu, dan Babinsa Uritetu. Vendor Mitra GPM yang ikut yaitu: 1) Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara; 2) PT. Tri Samudra Alfamidi Cabang Ambon; 3) Peternakan Ayam Morela; 4) Fa. Bandil; 5) Toko Mail; 6) Petani Sayuran Desa Laha; 7) Hypermart dan 8) Hypermart Ambon.

Penjualan komoditas pangan terdiri dari: Beras SPHP (12.000/kg); Gula Konsumsi (16.000/kg); Minyak goreng Rizky (18.00/Lt); Bawang merah (33.000/kg); Bawang putih (35.000/kg); Minyakita (15.500/L); Daging ayam (38.000/kg); telur ayam (30.000/kg); cabai rawit merah (50.000/kg); cabai merah keriting : (70.000/kg); cabai keriting hijau : (30.000/kg); Terigu : (11.000/kg); Aneka Sayur 10.000/pack. Omset penjual hasil GPM sebesar Rp. 28.284.218.



17. GPM Studio Alam TVRI

GPM dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Januari 2025 bertempat di Studio Alam di Jalan Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok – Jawa Barat, dalam rangka kegiatan rutin TVRI untuk memeriahkan perayaan tahun baru Imlek 2025, bekerja sama dengan studio alam TVRI Depok. TVRI melaksanakan perayaan Lunar Luir 2025 sebagai media nasional dengan motto media pemersatu bangsa.

Pelaksanaan GPM dihadiri Direktur utama LPP TVRI, anggota dewan pengawas TVRI, Kepala TVRI wilayah DKI Jakarta, Direktur program pemberitaan, dan Ka. Tim pasokan pangan, dan masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan lainnya selain GPM antara lain: Atraksi barongsai; angklung pensiunan Bank Mandiri Depok; persembahan musik

Vendor yang berpartisipasi (Perum Bulog; ID Food; Aslupama; Pinsar Indonesia; PT. BMN/WargrosNu; CPI; Agro Bakti Jaya Farm; Perpadi Jabar; dan Sadulur Papat). Bahan pangan pokok yang dijual sebagai berikut: Beras SPHP 5 kg: Rp 58.000; Beras Premium 5 kg: 73.000; Minyak Goreng Kita 1 liter : Rp 15.500; Gula Konsumsi 1 kg: Rp 17.500; Karkas Ayam Utuh 1 ekor: Rp 33.000; Bawang Putih per pack: Rp 35.000; Bawang Merah per pack: Rp 25.000; CRM per 0.5 kg: Rp 45.000.



18. GPM dalam rangka Hari Gizi Nasional

GPM dilaksanakan di Kemenkes RI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus merupakan salah satu dari rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Beberapa kegiatan lainnya selain GPM antara lain: Bazar UMKM, Edukasi Gizi serta Sosialisasi Pangan dan Gizi.

Direktorat SPHP Badan Pangan Nasional mengikut sertakan tiga vendor mitra GPM yaitu CPI (Ayam dan olahan ayam), Alfresh (aneka sayur dan buah) dan Aslupama (gula, beras, minyak).

Bahan pangan pokok yang dijual sebagai berikut: Beras SPHP 5 kg: Rp 58.000; Beras Premium 5 kg: 73.000; Minyak Goreng Kita 1 liter : Rp 15.700; Gula Konsumsi 1 kg: Rp 17.500; Karkas Ayam Utuh 1 ekor: Rp 33.000; Bawang Putih per pack: Rp 35.000; Bawang Merah per pack: Rp 25.000; CRM per 0.5 kg: Rp 45.000



19. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. Pada bulan Januari 2025 penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP difokuskan pada penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan dan koordinasi teknis dengan calon pengusul terkait pelaksanaan kegiatan FDP yaitu Surat usulan dari Koperasi Produsen Aslupama Maju Bersama dengan nomor surat 11/KOPASLUPAMA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 untuk komoditas bahan pangan dari gapoktan ke kios pangan.

20. Kios pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Perkembangan Kios pangan per 31 Januari sebanyak 453 Kios Pangan yang tersebar di 31 Provinsi dan 103 Kabupaten/Kota.

21. Coaching Aplikasi Stroberi Kasir

Coaching aplikasi stroberi kasir dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2024 di ruang rapat Deputi KSP dipimpin oleh Ketua Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan dan dihadiri Institusional Bisnis Division BRI, Mikro Bisnis Development BRI dan tim SPHP.

Tujuan *coaching* aplikasi stroberi kasir untuk dapat mengetahui secara menyeluruh terkait fungsi dan penggunaan Aplikasi stroberi kasir sehingga aplikasi ini mampu menjadi sistem pelaporan penjualan/keuangan di kios pangan. *Coaching* dilakukan dengan pemberian materi oleh BRI dan praktek aplikasi stroberi kasir.

Stroberi Kasir merupakan aplikasi Point Of Sales (POS) atau aplikasi manajemen kasir berbasis Android yang dikembangkan oleh BRI. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti: (1) mencatat riwayat transaksi, (2) membuat laporan keuangan, (3) membuat order ke supplier, (4) mengelola produk yang akan dijual, (5) Qris, (6) buka tutup kas dan (7) mengawasi dan mengevaluasi tagihan.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh siapa pun, baik nasabah BRI maupun non-nasabah. Stroberi kasir dapat diunduh secara gratis melalui *Google PlayStore*. Stroberi kasir efektif untuk digunakan oleh pengelola kios pangan sebagai bentuk pencatatan transaksi penjualan dan keuangan serta sebagai evaluasi kegiatan. Database yang harus dimiliki oleh Bapanas: nama Kios Pangan dan nomor hp yang didaftarkan ke aplikasi stroberi kasir untuk memudahkan dalam membuat laporan kinerja kios pangan secara agregat.

Tindaklanjut, Bapanas perlu bersurat ke BRI terkait data dan kebutuhan untuk diakomodir oleh stroberi kasir serta penyesuaian aplikasi. PKS penggunaan stroberi kasir untuk mendukung Kios Pangan.



Gambar 24. *Coaching* Aplikasi Stroberi Kasir

22. Hasil Musyawarah Nasional Perpadi 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 yang berlokasi di Diamond Solo Convention Center. Kegiatan Munas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Perpadi Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Direktur PLN, Ketua dan Perwakilan DPD dan DPC Perpadi se-Indonesia, dan tamu undangan dari berbagai K/L.

Kegiatan Munas Perpadi tahun 2025 yang diselenggarakan dari tanggal 14-16 Januari 2025 mengangkat tema "Sinergi Perpadi Bersama Pemerintah Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional" diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan pemecahan solusi bersama untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi multi pihak, baik dari elemen petani, usaha penggilingan, Perum BULOG, Perusahaan Perberasan, Lembaga Pembiayaan dan Bank, dan Kementerian/Lembaga terkait.



Gambar 25. Munas Perpadi 2025

23. Bantuan Korban Bencana Banjir Kabupaten Pekalongan dan Lampung Selatan

Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Pangan bersama BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha pangan menyampaikan bantuan pangan ini kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Pekalongan dan Lampung Selatan.

Pemenuhan pangan bagi warga terdampak bencana menjadi salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi bencana tambahan berupa kerawanan pangan. Kepala Badan Pangan Nasional mendampingi Pak Menko Pangan bersama BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha pangan menyampaikan bantuan pangan ini kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Pekalongan dan Lampung Selatan.

Donasi yang terkumpul merupakan hasil kolaborasi Kemenko Bidang Pangan dan NFA bersama dengan Pemerintah Daerah, Perum Bulog, ID FOOD, dan BRI. Selanjutnya dari swasta antara lain PT Suri Nusantara Jaya; PT Best Agro International; PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk; PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk; PT Pemukasakti Manisindah; PT Incasi Raya Group; PT Malindo Feedmill Indonesia; PT Gunung Madu Plantations; Indofood; PT FKS Food Sejahtera Tbk; dan PT Industri Gula Nusantara Kendal.

Asosiasi pelaku usaha pangan yang juga mitra Badan Pangan Nasional turut berdonasi antara lain Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Petelur Nasional (PPN); Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) DKI Jakarta; Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT); dan Asosiasi Peternak Telur Blitar, Kediri, Tulungagung, Ngalam dan Trenggalek (BKTNT).

Turut hadir dalam penyaluran bantuan ini Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta perwakilan dari BPBD Jawa Tengah, Perum Bulog, ID FOOD, dan stakeholder pangan terkait

Diharapkan dengan adanya bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban para korban terdampak banjir.



c). Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standar Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Januari 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan distribusi dan cadangan pangan yaitu Finalisasi Penyusunan Studi Klasifikasi Lumbung Pangan Masyarakat. Dokumen tersebut disusun sebagai bagian dari kelengkapan dalam penyusunan indikator penilaian setiap tingkatan kondisi dan keragaan LPM, dan pelaksanaan penilaian dan pengelompokan LPM sesi dengan kriteria serta penyusunan strategi penguatan dan pengembangan kegiatan LPM pada periode tahun berikutnya. Sedangkan NSPK yang telah disusun selama bulan Januari 2025 yaitu:

- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 588.1/2024 tentang Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Pangan Nasional
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 3/2025 Juknis Tata Cara Pengadaan CPP 2025
- Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1/2025 Juknis DAK Non Fisik 2025
- Keputusan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 1/2025 Juknis Pelaksanaan Penguatan Sarpras Logistik Pangan
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593/2024 Juknis Bantuan Pangan 2025
- Surat Penugasan Kepala ke Bulog ttg Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025
- ROPAK Lingkup DCPTahun Anggaran 2025
- Perjanjian Kinerja (PK) DIPAAwal Direktur DCP 2025

- ❖ Draft SK Tim Bantuan Pangan
- ❖ Draft SK Tim Pemantauan CPP Bencana
- ❖ Draft SK Tim Pemantauan CPP
- ❖ Rancangan Revisi Perbadan 15/2023 (Harmonisasi)
- ❖ Rancangan Keputusan Badan Juknis Tata Cara Lelang untuk Pelepasan CPP
- ❖ Rancangan UUPerubahan UU 18/2012
- ❖ Rancangan Surat Perjanjian Bantuan Pangan 2025
- ❖ Rancangan Adendum Juknis Pelepasan CJP 2025
- ❖ Rancangan Revisi Perpres 125/2022

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan

a) Rapat Koordinasi Pembahasan Data Penerima Bantuan Pangan Tahun 2025

Rapat koordinasi diselenggarakan secara Hybrid di JW Marriott Hotel Jakarta tanggal 6 Januari 2025 dan membahas penggunaan data penerima bantuan pangan dalam rangka penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan 2025. Rapat dihadiri oleh Deputi Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas; Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas; Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas; Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pangan Nasional; serta Fungsional Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas. Adapun hasil rapat koordinasi sebagai berikut:

- ❖ Badan Pangan Nasional akan menggunakan data Regsosek Bappenas sebanyak 16.000.000 data untuk penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025;
- ❖ Badan Pangan Nasional bersama Bappenas telah melakukan verifikasi dan validasi data Regsosek sebanyak 16.000.000 telah dilakukan verifikasi dan validasi, didapati data dengan informasi by name by address serta dilengkapi dengan NIK dengan sebaran data sebanyak 2.000.000 data Regsosek yang berada di Desil 3 dapat digunakan sebagai data alternatif pengganti
- ❖ Penyerahan data Regsosek akan menggunakan mekanisme SPLP yang dilaksanakan oleh Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas.
- ❖ Dokumen perjanjian kerjasama dan kerahasiaan data telah dianalisis oleh Biro PKH dan dalam proses perbaikan Biro OSDH Bapanas. Dokumen tersebut akan ditandatangani oleh Sekretaris Bappenas dan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas. Hal ini sesuai dengan paraturandi Bappenas terkait dengan penandatanganan dokumen PKS adalah pejabat definitif.
- ❖ Bapanas telah membuat akun operator penggunaan data Regsosek di SEPAKAT Bappenas dan sudah mengupload dokumen Surat Permintaan Data, Surat Penunjukan Operator, dan KAK

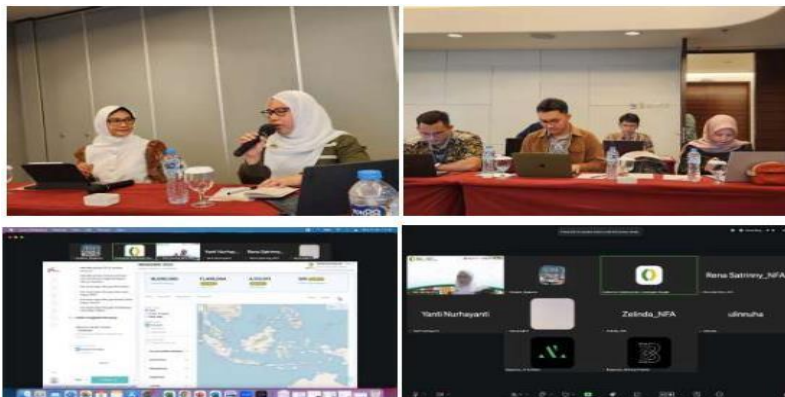
penggunaan data. Akun SEPAKAT berguna untuk akses terhadap data Regsosek secara nasional BNBA.

- ❖ Perlu adanya pertemuan lanjutan antara Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas yang didampingi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan serah terima data melalui SPLP.

b) Rapat Pembahasan data PBP 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025 di Avenzel Hotel, Bekasi dengan tujuan Verval Tahap I dimana poin-poin hasil sebagai berikut:

- ❖ Badan Pangan Nasional bersama Bappenas melakukan verifikasi dan validasi data Regsosek.
- ❖ Data hasil penyaluran bantuan pangan bulan juni dan SPTJM Tahun 2024 dilakukan pemadanan dengan data Regsosek Bappenas dan dilakukan pemadanan NIK pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri oleh Bappenas.
- ❖ Disepakati data yang digunakan untuk penyaluran bantuan pangan Tahun 2025 menggunakan data hasil pemadanan data Regsosek dengan data penyaluran Tahun 2024 yang telah dipadankan dengan SIAK Kemendagri.
- ❖ Badan Pangan Nasional bersama Bappenas telah melakukan verifikasi dan validasi data Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:
 - Data dengan NIK pada SIAK Kemendagri;
 - Data dengan tingkat kesejahteraan persentil terendah di wilayah masing-masing kabupaten/kota, lansia keparumagtanggadan keparumagtanggaperempuan.
- ❖ Beberapa pertimbangan penentuan peringkat kesejahteraan berdasarkan kondisi kesejahteraan per kabupaten/kota. Hal ini mempertimbangkan:
 - berdasarkan kondisi sosial ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, karena dalam penetapannya dilakukan berdasarkan karakteristik di masing-masing kabupaten/kota;
 - persepsi sosial; dan tingkat rerata kesejahteraan di setiap kabupaten/kota
- ❖ Data penerima bantuan pangan terdiri atas Nama, NIK, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa) per kabupaten/kota.



c) Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Perbadan Nomor 15 Tahun 2023

Rapat koordinasi diselenggarakan di Aston Priority Simatupang Hotel dan Convention Center pada tanggal 8 Januari 2025 dan dihadiri oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kemendesa; Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional; dan Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras

Pemerintah Daerah. Adapun butir-butir penting hasil pertemuan sebagai berikut :

- ❖ Forum menyetujui usulan perubahan Perbadan 15 Tahun 2023 oleh Bapanas. Perubahan dengan menyisipkan 2 pasal yang menegaskan pengadaan Cadangan beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah, dan penambahan mekanisme penganggaran untuk Cadangan beras pemerintah daerah dapat bersumber dari dana desa.
- ❖ Perwakilan Kementerian Desa mengusulkan narasinya sebagai berikut dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan.
- ❖ Rincian penambahan 2 pasal tertera sebagai berikut Pasal 3A Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Pendanaan untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber pada:
 - a. dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan CBPK dan CBPP; dan/atau
 - c. pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ❖ Biro Hukum akan segera mengusulkan rapat harmonisasi peraturan atas rencana perubahan Perbadan tersebut.



d) Rapat Koordinasi Rapat Rekonsiliasi Data Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 di Hotel Aston TB Simatupang. Rapat dilaksanakan dalam rangka rekonsiliasi dan konfirmasi data penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Adapun butir-butir hasil rapat koordinasi sebagai berikut:

- ❖ Biro PKH menyampaikan bahwa dalam masa transisi sekarang perlu dijaga keberlanjutan laporan data penyelenggaraan CBP dalam Sismonev. Sehingga diperlukan keakuratan
- ❖ data penyelenggaraan CBP sehingga rekonsiliasi data diperlukan dalam laporan tersebut. Revisi laporan penyelenggaraan CBP dikirimkan maksimal tgl 10 Januari 2025.
- ❖ Laporan CBP yang disampaikan oleh Perum BULOG belum konsisten antara laporan manajerial dengan surat penyampaian laporan dari Dirut Perum BULOG dan didalam laporan tersebut masih mencantumkan golongan anggaran dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyampaikan bahwa data yang dilaporkan kepada Badan Pangan Nasional bersumber dari aplikasi ERP Perum BULOG berupa PO (order pembelian) berbeda dengan data impor yang dilaporkan ke Kemendag yang berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyatakan bahwa Perum BULOG masih kesulitan dalam menyajikan neraca stok CBP secara runtun waktu dikarenakan adanya faktor susut, barang rusak, pengalihan PSO menjadi komersial dan kesalahan penginputan. Dimana faktor-faktor tersebut dikategorikan dalam penyaluran "lainnya" yang besarnya mencapai 1 persen dari total stok CBP.
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyepakati per Tahun 2025 laporan manajerial yang dikirimkan satu kali di pagi hari dengan cut off data pukul 23.59 WIB di hari sebelumnya.
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyatakan bahwa perbedaan jumlah pelaporan pengadaan impor di Bulan Juni 2024 dikarenakan human error dalam penginputan, Badan Pangan Nasional meminta bukti pendukung berupa file PO di bulan Juni sebagai bahan pendukung perubahan data yang dilaporkan dalam SISMONEV.
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyampaikan data pengadaan dalam negeri CBP Tahun 2024 yang telah dipisahkan antara PSO dan komersial sebesar 831.598 Ton dan pengadaan luar negeri sebesar 3.874.506 Ton sehingga total pengadaan Tahun 2024 sebesar 4.706.104 Ton. Stok akhir CBP Tahun 2024 adalah sebesar 1.792.331 Ton dengan rincian sebagai berikut:
- ❖ Tim teknis data Perum BULOG menyampaikan bahwa terjadi kesulitan dalam pemisahan pencatatan penyaluran untuk CBP dengan CPPD dikarenakan jadwal penyaluran CPPD tidak terjadwal secara reguler sehingga mengganggu turn over stok (FIFO) dari Perum BULOG. Konsekuensi dalam pemisahan pencatatan adalah biaya perawatan CPPD harus ditanggung oleh daerah. Daerah harus mempunyai dan memahami konsep mengenai CPPD sehingga stok yang disimpan terjaga kualitasnya.
- ❖ Tim Teknis data Perum BULOG menyepakati untuk melaporkan permasalahan pencatatan penyaluran CBP dengan penyalur golongan anggaran dan CPPD ke tingkat pimpinan.

- ❖ Direktorat DCP merevisi laporan Penyelenggaraan CPP dalam Sismonev sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Perum BULOG.



e) Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Perpres 125 Tahun 2022

Rapat dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Aston Priority Simatupang tanggal 14 Januari 2025. Rapat dibuka oleh Direktur DCP dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Keuangan, Perum BULOG; Asisten Deputi Cadangan dan Bantuan Pangan; Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA Kementerian Keuangan (diwakilkan); Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan BA BUN, DJA, Kementerian Keuangan (diwakilkan); Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, DJA, Kementerian Keuangan (diwakilkan); Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum BULOG (diwakilkan); dan Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan. Beberapa hal hasil diskusi rapat tersebut :

- ❖ Rapat merupakan tindak lanjut atas rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 8 Januari 2025 dan 10 Januari 2025.
- ❖ Kementerian Keuangan mengusulkan beberapa point, yakni:
 - a. penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 3 terkait jumlah pengadaan CPP yang terdiri dari pengadaan, penyaluran, dan stok akhir;
 - b. penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 3 terkait penetapan jumlah CPP diintegrasikan dengan proses perencanaan penganggaran;
 - c. penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 6 terkait pengadaan CPP untuk komoditas beras melalui pembelian dari petani diutamakan dalam bentuk gabah;
 - d. penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 10 terkait penerimaan dari hasil penyaluran

CPP dicatat dan dikelola oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat digunakan untuk pengadaan CPP pada tahun anggaran berikutnya;

- e. penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 10 terkait mekanisme pencatatan dan pengelolaan CPP dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - f. penambahan 1 (satu) pasal baru terkait pembayaran CPP kepada Perum BULOG dan BUMN Pangan;
 - g. penambahan 1 (satu) ayat baru pada Pasal 13 terkait pendanaan penyelenggaraan CPP bersumber dari penerimaan hasil penyaluran CPP; dan
 - h. penambahan Bab baru terkait akuntabilitas dan pelaporan penyelenggaraan CPP. CPP.
- ❖ Forum menyepakati penambahan Bab dan bagian untuk penyempurnaan susunan rancangan Perpres 125/2022, serta penambahan satu 1 (satu) bab terkait ketentuan peralihan untuk mengakomodir kegiatan penyelenggaraan CPP yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Perpres baru.
 - ❖ Konsep rancangan perubahan Perpres 125 Tahun 2022 terlampir.
 - ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan melaksanakan rapat koordinasi teknis pada Rabu, 15 Januari 2025 dengan agenda pembahasan rancangan perpres 125.



f) Rapat Pembahasan Kontrak Penyaluran Bantuan Pangan dan Bencana Alam Tahun 2025

Rapat dilaksanakan secara tatap muka, Jumat 17 Januari 2025. Rapat dipimpin Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan. Hadir dalam rapat Direktorat Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum BULOG; Divisi Keuangan, Perum BULOG; Kepala Biro Perencanaan, Kejasama, dan Humas; Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum; Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan; Tim Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas. Rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan kontrak penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk penyaluran bantuan pangan, SPHP serta bencana alam Tahun 2025. Beberapa hal hasil diskusi rapat tersebut :

- ❖ Proses yang telah dilakukan oleh Biro PKH Bapanas yaitu sedang mengajukan ABT untuk Banpang beras untuk alokasi Januari-Februari sebesar Rp4,5T dan untuk SPHP sebesar Rp504,9M.
- ❖ Pencairan ABT pertama direncanakan untuk SPHP di bulan Mei dan untuk Banpang beras di bulan

Juni dengan asumsi jadwal penyaluran tidak tepat waktu.

- ❖ Penambahan nomenklatur alokasi bulan Januari - Februari dalam judul Kontrak dengan pertimbangan:
 - Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515/TS.03.03/K/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penugasan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.
 - Pengajuan ABT juga untuk alokasi Januari- Februari 2025.
- ❖ Perubahan secara teknis:
 - Perubahan kalimat pada pasal 2 poin a yaitu “selama 2 (dua) bulan” menjadi “untuk 2 (dua) bulan alokasi”. Karena dimungkinkan penyaluran melewati batas waktu yang dijadwalkan.
 - Pada pasal 3, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Kontrak jenis harga satuan sesuai Perpres 16 Tahun 2018 pasal 27 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
 - Definisi atau ketentuan umum BPKP, mengacu ke Peraturan BPKP nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksana Hari dan Pelaksana Tugas di Lingkungan BPKP.
 - Sesuai Kontrak Pasal 4 ayat (1) terdapat penambahan dokumen di poin e, yaitu Petunjuk Teknis.
 - Masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 untuk penugasan alokasi bulan Januari-februari. Ke depannya akan dilakukan addendum menyesuaikan surat penugasan yang baru.
 - Pada (6.1) Perubahan jadwal pelaksanaan kontrak tidak lagi mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515/TS.03.03/K/12/2024 namun “sejak data penerimaan bantuan pangan tersedia dan siap digunakan untuk penyaluran”.
 - Perubahan pada sub bab Pendistribusian: 1. Penambahan poin 8.5 yaitu menjadi “Segala sesuatu hal yang terjadi dalam pendistribusian Bantuan Pangan Beras oleh Transporter menjadi tanggung jawab Pelaksana.”
 - Poin 8.6 biaya distribusi semula diusulkan kepada PPK menjadi kepada KPA.
- ❖ Pada sub bab Waktu penyelesaian kegiatan, poin 11.1 diubah karena tidak sesuai dengan juknis, namun dengan mempertimbangkan waktu kesiapan data penerima bantuan pangan.
- ❖ Perubahan pada sub bab Perpanjangan waktu:
 - Pada poin 12.1 kalimat “maksimal 1 (satu) bulan)” dihapus; perubahan pengajuan perpanjangan waktu semula kepada PPK menjadi KPA

- Pada poin 12.3 terdapat penambahan kalimat “setelah waktu perpanjangan 1 (satu) bulan” sehingga menjadi Apabila Pelaksana belum dapat menyelesaikan penugasan setelah waktu perpanjangan 1 (satu) bulan, maka PPK dapat memberikan teguran tertulis.
- ❖ Pada subbab Perubahan kontrak poin 13.2 penambahan kalimat “dan/atau belum cukup diatur
- ❖ Pada sub bab Berakhinya Kontrak, poin 16.1 perlu dibahas lebih lanjut dengan Biro OSH kedua belah pihak.
- ❖ Pada subbab Hak dan kewajiban poin 18.2 c redundant dengan poin 8.2 sehingga dihapus.
- ❖ PPK menyampaikan bahwa surat permohonan penyaluran secara kolektif untuk Tahun 2025 akan dibuat dengan dasar realisasi real time data penyaluran Perum BULOG.
- ❖ Penanggalan kontrak SPHP tidak bisa diberikan tanggal 31 Desember 2024 dikarenakan penunjukan PPK sesuai SKKP No. 01/KU.01.01/B/01/2025 per tanggal 2 Januari 2025.

Tindak lanjut :

- ❖ Penukaran nomor kontrak SPHP dengan kontrak Bantuan Pangan karena pelaksanaan kegiatan SPHP sudah dilakukan sejak tanggal 6 Januari 2025.
- ❖ Hasil dari pertemuan hari ini akan diberikan kepada masing-masing pihak untuk pendalaman lebih lanjut sebelum difinalisasi.



g) Harmonisasi Rperbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 secara hybrid dipimpin langsung oleh Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H Pembina Tim Harmonisasi Kemenkum, dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Bapanas; Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Bapanas; Tim Harmonisasi RPerbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum; Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Urusan Daerah,

Kemendagri; Perwakilan Biro Hukum, Kemendagri; Perwakilan Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa; Perwakilan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa; Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Desa; Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Bapanas; Perwakilan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas; Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Harmonisasi Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pertemuan harmonisasi membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Konsideran menimbang perlu dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa”
- ❖ Perlu mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah”
- ❖ Ketentuan pada Pasal 3A: Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
- ❖ Ketentuan pada Pasal 3B:
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan CBPP dan CBPK;
 - dana desa untuk mendukung penyelenggaraan CBPD; dan/atau
 - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Ketentuan lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- ❖ Tindak lanjut dari hasil kesepakatan harmonisasi ini akan diproses lebih lanjut oleh Kemenkumham untuk diundangkan.



h) Rapat Koordinasi Distribusi Jagung Nasional

Rapat koordinasi diselenggarakan secara daring pada tanggal 9 Januari 2025 dipimpin oleh Asdep Sistem Distribusi Kemenko Pangan, dihadiri oleh Asdep Logistik Pangan Dalam Negeri, Asdep Pengelolaan Sarpras Produksi Pertanian Kemenko Pangan, Direktur DCP, Kepala Dinas KPProv NTB, Pimwil Bulog NTB, perwakilan dari Dit Serealia Kementan, Dit Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kemenhub, Dit SPHP Bapanas, Dinas PKab Dompu, Bima dan Sumbawa Prov NTB. Berikut beberapa poin pembahasan:

- ❖ Jagung merupakan salah satu komoditas yang menjadi target swasembada pangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Pada tahun 2024, angka produksi jagung sebesar 15,21 juta ton (JPKKA 14%). NTB merupakan salah satu provinsi produsen jagung yg berada di Kab Sumbawa, Bima dan Dompu. Panen jagung akan dimulai bulan ini dengan puncak panen raya pada bulan Maret 2025. Oleh karena itu, perlu perencanaan penyerapan panen petani jagung di Prov NTB.

- ❖ Agenda rapat hari ini:

- Estimasi waktu dan volume panen raya jagung di Prov NTB, khusus nyabulan Jan-Maret 2025
- Identifikasi off taker dan penyaluran jagung keluar NTB
- Kesiapan logistik dan transportasi
- Kesiapan Gudang penyimpanan, baik di NTB dan daerah diluar NTB
- Rencana

kunjungan lapangan Hasil diskusi:

- ❖ Panen jagung akan dimulai bulan Januari hingga puncak pada bulan Maret 2025 di Kab Sumbawa, Dompu dan Bima. Namun utk Kab Dompu kemungkinan akan terjadi penurunan produksi karena tahun lalu terjadi gagal panen sehingga petani enggan menanam jagung kembali tahun ini
- ❖ Penyerapan jagung petani diusahakan KA 14% agar tidak terjadi kerusakan dalam penyimpanan maupun proses distribusi ke daerah konsumen. Oleh karena itu perlu dukungan teknologi pasca panen untuk proses pengeringan
- ❖ Perlu edukasi bagi para petani untuk meningkatkan nilai jual jagung dan menyelamatkan harga jagung di tingkat petani
- ❖ Distribusi jagung keluar NTB agar dapat dilakukan secepatnya untuk menjaga kondisi jagung tetap baik. Saat ini lama tunggu di Pelabuhan Bima hampir 2 minggu sehingga kondisi jagung dapat rusak.
- ❖ Tol laut siap mendukung proses pengiriman jagung dari NTB ke Jawa dengan rute Tj Perak – Badas – Bima – Tj Perak menggunakan kapal subsidi. Ditjen Hubla telah mempersiapkan pelaksana angkutan laut yang terdiri dari: anggaran, ketersediaan kapal dan trayek

- ❖ Dalam proses pengiriman tol laut, angkutan balik hanya terisi separuhnya sehingga perlu sosialisasi bagi para pelaku usaha/ pihak terkait untuk memanfaatkan layanan tersebut
 - ❖ Perlu inventarisasi dan optimalisasi gudang baik milik pemerintah/swasta termasuk resi gudang baik di NTB maupun di Jawa untuk penyimpanan jagung
 - ❖ Selain penyerapan jagung petani, Bulog Kanwil NTB masih memiliki tugas pelepasan stok CJP pengadaan tahun 2024 sebanyak 51 ributa.
 - ❖ Dalam proses hilirisasi jagung, perlu alternatif lain tidak hanya pabrik pakan
- Tindak lanjut:
- ❖ Akan diagendakan rapat pembahasan berikutnya
 - ❖ Kunjungan lapangan akan diagendakan berikutnya

3. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025 serta sesuai dengan Hasil Rakortas Kemenko Pangan Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, Badan Pangan Nasional akan melanjutkan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 bagi Komoditas Beras sebagai antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan gizi, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan tersebut, Badan telah menerbitkan surat penugasan kepada Perum BULOG sesuai dengan Surat Kepala Badan Nomor 515/TS.03.03/K/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025. Penugasan tersebut memberikan tugas kepada Perum BULOG untuk melakukan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan pada tahun 2025 berupa Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Beras @10kg/Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk 16.000.000 PBP dengan waktu penyaluran selama 2 (dua) bulan pada Bulan Januari s.d. Februari 2025.

Dapat diinformasikan bahwa data PBP untuk pemberian bantuan beras bersumber dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) KemenPPN/Bappenas. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras. Alokasi Anggaran Pembiayaan untuk Penyaluran CPP Pemberian bantuan pangan tersebut belum tersedia dalam APBN, namun secara bertahap akan dialihkan ke BA 125 Badan Pangan Nasional dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berada pada Direktur Distribusi dan Cadangan

Pangan, melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

4. **Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Dalam penguatan cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu mengintegrasikan pengembangan sistem data dan informasi cadangan pangan sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan penentu kebijakan. Sebagai integrasi data cadangan pangan nasional yang meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Updating database CPP, CPPD, serta CPM LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id), per 31 Januari 2025, pelaporan stok/cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (IDFOOD) dalam bentuk infografis sebagai berikut :

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Januari 2025 dengan total sebesar 7.260,95 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per minggu ke IV Januari 2025 dengan total sebesar 13.742,64 ton yang tersebar di 314 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Januari Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) KRO dan 6 output/RO berdasarkan pembagian dari masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.921.079.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sejalan dengan adanya revisi DIPA ke 1 maka terjadi perubahan anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp47.598.506.000,-.
2. Berdasarkan pemantauan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan posisi tanggal 31 Januari 2025, realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp331.527.519,- atau 0,70% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp47.598.506.000,-.
3. Realisasi anggaran berdasarkan RO, dimana belum semua direktorat melakukan pencairan pada masing-masing RO, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target penarikan anggaran pada periode Januari 2025 yang masih jauhnya capainnya.
4. Terdapat realisasi fisik pada RO Koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan. Untuk realisasi fisik pada Direktorat Lainnya belum terdapat, walaupun dari sisi anggaran dan kegiatan sudah ada progres namun realisasi keuangan masih terlalu kecil. Pada periode Januari kegiatan dilakukan pada tahap persiapan pengumpulan bahan dan informasi pendukung.

IV.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan Januari Tahun

2025 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Namun capaian kinerja realisasi keuangan pada bulan tersebut yang masih sangat rendah, disebabkan karena keterlambatan dalam perencanaan kegiatan dan keterlambatan proses penyelesaian dokumen SPJ pendukung realisasi keuangan.

IV.3. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025 agar tetap berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan dan untuk realisasi keuangan perlu mempercepat pemenuhan dokumen pendukung realisasi periode bulan selanjutnya dan melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan.